

IMPLEMENTASI OTONOMI PENDIDIKAN DI MADRASAH

(Studi Kasus Guru PAI di MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Tarbiyah



Disusun oleh:

SODIQUN
3102196

FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing	Hari/ Tanggal	Tanda tangan
Drs. Mahfud Junaedi, M.Ag	_____	_____
Syamsul Ma'arif, M.Ag	_____	_____



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS TARBIYAH**

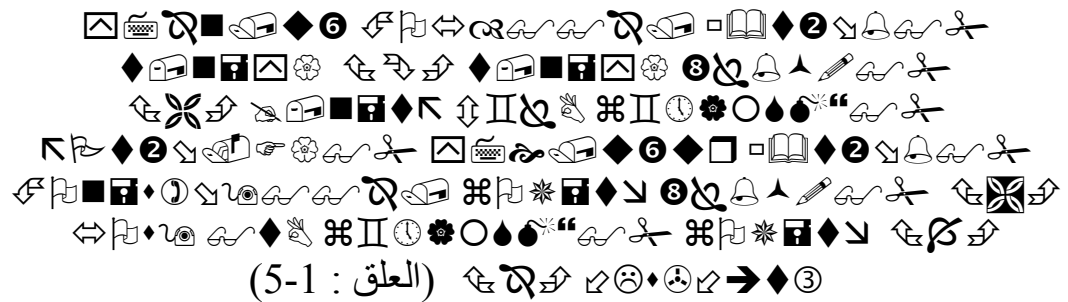
Jl. Prof. Dr. Hamka telp. 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

	Hari/ Tanggal	Tanda tangan
<u>Hasmi Hasona, M.Ag</u> Ketua Sidang	_____	_____
<u>Siti Tarwiyah, M.Hum</u> Sekretaris Sidang	_____	_____
<u>Ahwan Fanani, M.Ag</u> Penguji I	_____	_____
<u>Sugeng Ristiyanto, M.Ag</u> Penguji II	_____	_____

MOTTO

Firman Allah surat al-Alaq ayat 1-5 :



“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajarkan (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq : 1-5)¹

¹ Soenarjo dkk, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Alwaah, 2003), hlm. 1079

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati,
Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Ibunda Siti Aisyah
yang senantiasa memberikan perhatian
serta mendoakan kesuksesan kepadaku.

Doa penulis haturkan kepada Allah
semoga bapak dan ibu senantiasa dalam lindungan-Nya
dan semoga diampuni segala dosa yang telah dilakukan selama hidup.

Buat istri tercinta dan buah hati kami
yang senantiasa menjadikan hidup jauh lebih berarti

Adik-adikku Mutmainah, Uswatun Khasanah dan Siti Juwariyah
yang senantiasa menjadi motivator dan penyejuk hati

Teman-teman senasib seperjuangan
Segenap Dewan Guru MI Negeri Bugangin Kendal
khususnya Bapak Drs. Sutrisno yang menjadi motivator sejati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, maghfirah serta hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal dan petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita di dunia yang selanjutnya di akhirat.

Suatu yang kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis atas terselesainya penulisan tugas akhir akademik ini, meskipun dalam proses penyusunannya banyak mengalami hambatan dan cobaan, disebabkan lebih atas keterbatasan penulis. Namun, berkat bantuan dan motifasi serta doa dari berbagai pihak, alhamdulillah penulis dapat melalui semua itu, walaupun penulis menyadari skripsi yang berjudul **Implementasi Otonomi Pendidikan Di Madrasah (Studi Kasus Guru PAI di MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri)**, tentu jauh dari kesempurnaan.

Oleh karenanya, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. Mahfud Junaedi, M.Ag dan Syamsul Ma'arif, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama masa penyusunan skripsi
3. Para Dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta para staff karyawan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

4. Ibu Siti Aisah, istri tercinta beserta buah hati tersayang, serta adik-adikku Siti Juwariyah, Uswatun Khasanah dan Mutmainah atas segala dukungannya dan motivasi serta doa restunya sehingga terselesaikan studi ini.
5. Segenap Keluarga Besar MI Negeri Bugangin Kendal atas segala dukungan yang telah diberikan.
6. Shahabat-shahabatku, yang telah memberikan banyak hal yang tak bisa diungkapkan terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini, teriring doa *jazakumullah Khoiraljaza' wajazakumullah khoiran katsira*. Amin.

Terakhir kali, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Karena keterbatasan kemampuan, tenaga dan juga biaya serta wawasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif guna mengevaluasi dan memperbaiki skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya serta hazanah ilmu pengetahuan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2008

Deklarator,

Sodiqun
3102196

ABSTRAK

Sodiqun (NIM. 3102196). Implementasi Otonomi Pendidikan di Madrasah (Studi Kasus guru PAI di MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri). Semarang : Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;

1. Bagaimanakah implementasi otonomi pendidikan di MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri?
2. Bagaimana implementasi otonomi pendidikan di madrasah bagi guru PAI di MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri?

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa data yang di kumpulkan kemudian di susun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisa. Analisis data dalam penelitian ini tidak menampilkan angka-angka, melainkan berupa diskripsi dengan menggunakan pola berfikir induktif yakni terjun ke lapangan, mempelajari proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan- kesimpulan dari proses tersebut. Jadi analisis data dalam penelitian ini berupa uraian diskriptif mengenai problematika Implementasi Otonomi pendidikan di Madrasah bagi guru PAI di MI Miftahul Ulum Karangdowo Weleri.

Dalam penelitian ini hasil wawancara, pengamatan dan penelaahan dokumen tentang pelaksanaan pendidikan, kondisi dan situasi MI Miftahul Ulum Karangdowo Weleri Kendal baik secara umum maupun khusus semua dituturkan dengan jelas dan detail kemudian diklasifikasikan antara satu dengan yang lainnya.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diketahui sejauh mana proses implementasi otonomi pendidikan di madrasah. karena secara tidak langsung bergulirnya otonomi daerah berimbas pada otonomi pendidikan walaupun tidak merata. Hal inilah yang menurut penulis perlu mendapat respon tersendiri.

Kemudian, upaya apa saja yang telah dilakukan madrasah dalam era otonomi pendidikan tentu menjadi satu bahasan yang cukup menarik untuk disimak. Mulai dari bidang kurikulum madrasah yang mengacu pada standar isi yang telah disesuaikan dengan kurikulum terbaru (KTSP). Kemudian tenaga pengajar yang merupakan bahasan wajib pada penelitian ini, karena disampaikan mulai proses penambahan guru, persiapan – persiapan proses belajar mengajar sampai pada organisasi keguruan. Dana pendidikan tentu tak luput dari pengamatan, walaupun tak sedetail riilnya. Bahasan penghujung adalah tentang peran serta masyarakat dalam upaya membangun MI Miftahul Ulum Karangdowo Weleri, walaupun pada prakteknya belum cukup optimal.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para penimba ilmu pada umumnya, serta mahasiswa dan para praktisi pendidikan yang berada di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada khususnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Deklarasi	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Metode Penelitian	10

BAB II OTONOMI DAERAH DAN MADRASAH

A. Otonomi Daerah	13
1. Pengertian Otonomi Daerah	13
2. Latar belakang Otonomi Daerah	15
B. Madrasah	25
1. Pengertian Madrasah	25
2. Madrasah dan pendidikan Nasional	27
3. Posisi Madrasah di Era Otonomi Daerah	31
C. Implementasi Otonomi Pendidikan Di Madrasah	25
1. Kondisi Madrasah	25
2. Strategi Pelaksanaan Otonomi dalam Pendidikan	27
3. Strategi Madrasah Dalam Era Otonomi Daerah	31

**BAB III MI MIFTAKHUL ULUM KARANGDOWO WELERI
DI ERA OTONOMI DAERAH**

A. SITUASI UMUM MI KARANGDOWO WELERI	41
1. Sejarah MI	47
2. Organisasi Madrasah	52
3. Keadaan Guru, Siswa dan Karyawan	59
4. Keadaan Sarana Prasarana	59
B. OTONOMI PENDIDIKAN DI MI KARANGDOWO WELERI	45
1. Visi Misi Madrasah	47
2. Upaya MI Miftakhul Ulum Dalam bidang kurikulum	52
3. Upaya MI Miftakhul Ulum Dalam bidang Organisasi	59

**BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI OTONOMI PENDIDIKAN DI
MADRASAH**

1. Upaya Madrasah Dalam bidang Kurikulum	66
2. Upaya Madrasah Dalam bidang Tenaga Pengajar	68
3. Upaya Madrasah Dalam bidang Keuangan.....	70
4. Upaya Madrasah dan partisipasi masyarakat	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran	85
C. Penutup	86

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional kita sejak orde baru ditandai oleh suatu pelaksanaan pembangunan yang sentralistik. Hal ini merupakan konsekuensi bentuk pemerintahan kita sebagai suatu Republik Negara Kesatuan bukan negara federasi. Lebih-lebih pada tahap permulaan pembangunan nasional, kita menghadapi berbagai gejala seperti stabilitas nasional. Kita tidak dapat membangun apabila kita dilanda oleh berbagai kerusuhan dan ketidaksetabilan.

Oleh sebab itu dasar pembangunan nasional yang kita kenal dalam trilogy pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional, telah merupakan jaminan berhasilnya pembangunan nasional kita selama ini. Namun ada kritik bahwa pembangunan nasional kita masih terlalu menekankan pada *security approach* (stabilitas nasional). Akibatnya kita cenderung merencanakan dan melakukan sesuatu dari atas dan masih kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam pembangunan itu sendiri.¹

Dengan alasan diatas, kita harus mewujudkan suatu keseimbangan antara perencanaan dari atas dan partisipasi masyarakat dari bawah. Hal ini tergantung kepada tingkat pendidikan rakyat kita. Namun demikian dalam abad 21 ini terjadi perubahan-perubahan global yang antara lain menuntut partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat supaya mereka ikut secara aktif sejak tahap awal pembangunan masyarakat. Hal ini menunjukkan suatu masyarakat di mana para anggotanya sadar akan tanggungjawab perorangan maupun sosial, atau masyarakat yang mengetahui hak-haknya tetapi juga akan hak-hak sosial atau kebersamaan dari anggota masyarakat itu.

¹ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi pendidikan Nasional Dalam Perpektif Abad 21*, (Magelang : Indonesia Tera, 1999) hlm. 193

Tentunya hal ini menuntut apa yang disebut desentralisasi pembangunan nasional yang sejalan dengan terwujudnya otonomi daerah. Tuntutan masyarakat di atas seiring juga dengan pergantian pemerintahan kita. Maka untuk memenuhi tuntutan masyarakat itu pada tanggal 7 Mei 1999 Presiden Habibie menandatangani UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.² Penerapan UU No. 22 tahun 1999 tersebut secara drastis telah merubah konsep penyelenggaraan negara dari sentralistik ke desentralistik.

Dengan UU. No. 22 tahun 1999 Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan yang sangat besar termasuk kewenangan di bidang pendidikan. Sebagaimana termaktup dalam pasal 7 UU No. 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”³ Pasal 7 UU No. 22 tahun 1999 di atas menunjukkan telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam sistem politik Indonesia, kecuali kelima bidang yang secara jelas disebutkan.

Seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bidang garapan Pemerintah Daerah tingkat I dan II. Pasal tersebut juga mengisaratkan bahwa pengelolaan bidang pendidikan berada dalam kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota.⁴ Selain itu pendidikan yang selama ini dikelola secara terpusat harus diubah guna mengikuti irama yang sedang berkembang di mana otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai sistem pendidikan nasional.⁵

Hal itu selaras dengan UU No. 22 tahun 1999 yang menerangkan bahwa urusan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini

² Agus Joko Purwanto, *Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan* dalam Inservis Training KKM MTs/ MI, Depag RI, Jakarta, 2001, hlm. 9

³ Undang-undang otonomi Daerah 1999, (Surabaya : Arkola, 1999), hlm. 6-7

⁴ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 194

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Bebas Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), cet. I, hlm. 4

berarti bahwa daerah mempunyai wewenang yang penuh di dalam mengatur dan mengelola pendidikan yang ada di daerahnya. Menurut H.A.R Tilaar Pemerintah daerah mempunyai hak di dalam manajemen seluruh jenjang dan jenis pendidikan di daerahnya, bukan berarti pemerintah daerah mempunyai hak di dalam perkembangan ilmu.

Menurutnya dengan adanya otonomi daerah merupakan kebebasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang tumbuh di daerah.⁶ Dari pendapat tersebut jelas tersirat bahwa lembaga pendidikan Islam termasuk di dalamnya madrasah merupakan lembaga pendidikan yang manajemen pendidikannya di serahkan pada pemerintah daerah, bukan pada perkembangan ilmu pengetahuannya. Pernyataan H.A.R. Tilaar tersebut di atas di dukung oleh PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Pasal 2 ayat 11 menjelaskan tentang kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dan pasal 3 ayat 10 tentang wewenang pemerintah propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.⁷ Dikatakan: Wewenang pemerintah pusat dalam bidang pendidikan

1. Penetapan setandar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya,
2. Penetapan setandar materi pelajaran pokok,
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik,
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan,
5. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa,
6. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah,

⁶ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan : Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hlm. 485

⁷ Lihat PP. No. 25 tahun 2000, pasal 2 ayat 11 dan pasal 3 ayat 10 dalam Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah 2001, Citra Umbara, Bandung, 2001, hlm. 9-10 dan hlm. 24-25

7. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional,
8. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan wewenang propinsi dalam bidang pendidikan adalah:
 - a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu.
 - b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
 - c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
 - d. Pertimbangan pembukuan dan penutupan perguruan tinggi.

Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru Dalam PP No. 25 tahun 2000 tersebut, tidak disebutkan wewenang pemerintah daerah tingkat II dalam bidang pendidikan maupun bidang yang lain. Karena Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pada daerah kabupaten/kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.⁸ Jika dicermati lebih lanjut bidang yang belum diatur dalam peraturan pemerintahan ini adalah bidang sarana prasana (di luar buku pokok), guru dan tenaga administrasi, pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen operasional sekolah, hubungan dengan pihak luar dan strategi intruksional. Dengan kata lain, sebagian besar unsur yang mempunyai kaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kota madya dan semua unsur pendidikan yang ada di daerah. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tersebut, juga memberikan indikator yang sangat kuat bahwa seluruh jenis dan jenjang sistem pendidikan nasional pengelolaan dan manajemennya diserahkan kepada pemerintah daerah termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam yang pengelolaannya di bawah Departemen Agama.

⁸ *Ibid.*, Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, hlm. 34

Oleh karena itu, penetapan otonomisasi atau desentralisasi khususnya dalam bidang pendidikan tidak terelakkan lagi, sehingga menimbulkan berbagai implikasi terhadap pendidikan Islam.⁹ Seperti yang kita tahu bersama bahwa sekolah (Sekolah Dasar, SMP dan SMU) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional lebih dulu mengalami desentralisasi, beda halnya dengan lembaga pendidikan Islam (MI, MTs dan MA) yang berada di bawah Departemen Agama yang agak tertinggal walaupun pada akhirnya juga secara otomatis mengalami desentralisasi kepada pemerintah daerah, mengingat pada peraturan pemerintah tersebut. Harus diakui bahwa wacana, rencana dan rancangan program kearah desentralisasi pendidikan nasional belum sepenuhnya melibatkan lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah namun lembaga pendidikan Islam tersebut harus mengantisipasi perubahan tersebut. Selain persoalan konsep lembaga pendidikan Islam yang mengalami desentralisasi kepada pemerintah daerah sebenarnya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah.

Permasalahan yang dihadapi itu antara lain Persoalan guru yang *mismatch (salah kamar)* dan *underqualified (di bawah standar)*, sarana dan prasarana yang minim, partisipasi masyarakat yang rendah merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh madrasah, sehingga tidak mengherankan apabila madrasah masih jauh tertinggal dari sekolah umum lain.¹⁰ Kenyataan ini pada gilirannya berimplikasi pada kesiapan madrasah dalam era otonomisasi seperti sekarang ini. Maksud madrasah dalam penelitian ini adalah madrasah merupakan salah satu dari lembaga pendidikan Islam formal. Lembaga pendidikan Islam formal artinya suatu lembaga pendidikan Islam yang mempunyai penjenjangan serta kurikulum yang jelas. Dengan berbagai persoalan yang di hadapi lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah diatas, menarik minat penulis untuk

⁹ Azumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional : Rekontruksi & Demokratisasi*, (Jakarta : Kompas, 2002), hlm. 3

¹⁰ Masyarakat Pendidikan, *Madrasah diambang Otonomi dan Globalisasi*, Vol. I No. 5, Maret-April, 2002, hlm. 11

mengadakan penelitian tentang upaya yang dilakukan madrasah dalam era otonomi daerah, sebagaimana yang diungkapkan diatas bahwa kebijakan wacana dan rencana tentang otonomi baru menyentuh kepada sekolah-sekolah umum (SLTP/SMU) belum sampai kepada lembaga pendidikan Islam khususnya disini madrasah, namun pada gilirannya atau pada akhirnya nanti, otonomi daerah akan berdampak pula pada pendidikan Islam khususnya madrasah. Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus MI Karangdowo Weleri Kendal selain karena lokasinya yang strategis, sekolah ini memiliki murid terbanyak sekecamatan weleri.

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Implementasi Otonomi Pendidikan di Madrasah Studi Kasus Guru PAI di MI Karangdowo Weleri", Hal ini menjadi menarik melihat otonomi khususnya dalam bidang pendidikan belum sepenuhnya sampai pada pendidikan Islam khususnya madrasah, sebagaimana kita ketahui madrasah masih sentralis di bawah naungan Departemen Agama.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah dan beberapa pokok pikiran diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi otonomi pendidikan di MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri?
2. Bagaimana implementasi otonomi pendidikan di madrasah bagi guru PAI di MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi otonomi pendidikan bagi guru PAI di MI Karangdowo Weleri Kendal dalam era otonomi daerah.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Agar pemahaman terhadap maksud judul menjadi terarah serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan makna dan maksud kata-kata dalam judul tersebut sekaligus memberikan batasan-batasan istilah agar dapat dipahami secara kongkrit dan lebih operasional. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah:

1. Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹¹

2. Madrasah

Madrasah berasal dari bahasa Arab مدرسة yang berarti sekolah. Setelah diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Madrasah merupakan sebutan khusus bagi sekolah umum yang berciri khas Islam.¹² Madrasah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam.¹³

Madrasah di Indonesia merupakan istilah lazim yang hanya dipakai di sekolah-sekolah agama saja dan lebih khusus bagi sekolah Islam. Berbeda dengan di negara-negara Arab istilah madrasah dipakai untuk sekolah pada umumnya.¹⁴ Madrasah dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga sekolah yang berciri khas Islam yang mempunyai penjenjangan dan kurikulum yang jelas. Maksud madrasah dalam penelitian ini adalah MI Miftahul Ulum Karangdowo Weleri Kendal.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) hlm. 377

¹² Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan penyusunan naskah Indonesia, 1998), hlm. 111

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet II, hlm. 611

¹⁴ Soegarda Poerbakawatja dan AH. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1982, hlm. 199

3. Otonomi Pendidikan

Pendidikan menurut Syaikh Musthafa al-Ghulayani adalah:

التربية غرس الاخلاق الفاضلة في نفوس الناشئ وسقيها بماء الارشاد والنصيحة حتى تصبح ملكة من ملكات النفس ثم تكون ثمرتها الفاضلة والخير وحب العمل لنفع الوطن.

Artinya: “Pendidikan adalah menanamkan akhlak yang mulia dalam jiwa murid serta menyiraminya dengan petunjuk dan nasehat, sehingga menjadi kecenderungan jiwa yang membuahkan keutamaan, kebaikan serta cinta bekerja yang berguna bagi tanah air”.¹⁵

Otonomi pendidikan dalam Kamus Hukum Drs. Sudarsono adalah hak, wewenang dan kewajiban sekolah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Maksud otonomi pendidikan dalam penelitian ini adalah kewenangan madrasah untuk mengatur dan mengurus pendidikan setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. METODE PENELITIAN

1. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Kajian tentang madrasah merupakan obyek penelitian yang sangat luas, apalagi dikaitkan dengan otonomi daerah. Sampai saat ini madrasah belum sepenuhnya otonom, artinya masih cukup sentralis di bawah Departemen Agama, maka fokus penelitian dalam skripsi ini lebih menyorot pada upaya kesiapan guru PAI MI Karangdowo dalam era otonomi daerah. Adapun ruang lingkup penelitian tentang upaya persiapan madrasah dalam era otonomi daerah meliputi upaya persiapan dalam bidang kurikulum, guru, dana pendidikan dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

¹⁵ Musthafa al-Ghulayani, *Idhah al-Nasihin*, (Pekalongan: Rajamurah, 1953), hlm. 189.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 332

2. Sumber Data

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut dikaji dari beragam sumber data yang dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Data primer, sebagai informasi yang langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data. Sumber data semacam ini dapat disebut juga dengan data atau informasi dari satu orang ke orang lain.¹⁷ Data primer disebut juga data tangan pertama, ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁸ Sumber data tersebut berkenaan dengan seluruh informasi yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini dari berbagai sumber, meliputi:
 - 1) Informan yang terdiri dari kepala beserta dewan guru MI Miftakhul Ulum karangdowo Weleri
 - 2) Fenomena maupun kejadian yang diperoleh dalam aktifitas pengajaran
- b. Data sekunder, sebagai referensi yang dapat menguatkan permasalahan pokok yang dibahas. Juga bahwa sumber data sekunder merupakan informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penelitian saya ini.
Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁹ Sumber data sekunder diambil dari buku yang berkaitan dengan pola pengajaran dan kegiatan belajar mengajar. Juga dokumen maupun laporan tertulis

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), cet. II, hlm. 87-89

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2005), cet. VI, hlm. 91

¹⁹ *Ibid*, hlm. 91

tentang kegiatan atau informasi yang diambil dari pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan MI Miftakhul Ulum Karangdowo.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam studi literatur penulis menelaah buku-buku, karya tulis, karya ilmiah maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

Adapun untuk mendapat data empirik, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁰ Menurut Noeng Muhajir Observasi merupakan interaksi antara peneliti dan yang diteliti, dan ada pengaruh hambatan timbal balik. Karena itu peneliti harus memandang yang diobservasi sebagai subyek, mereka beraktifitas, segala sesuatunya indeterminan, dan secara bersama keduanya membangun data penelitian.²¹ Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi MI Karangdowo Weleri Kendal meliputi kurikulum, guru dan sarana prasarana pendidikan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban.²² Interview merupakan cara pengumpulan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II, (Yogyakarta : Andi Ofset, 2000), hlm. 136

²¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), Ed III, cet 7, hlm 115

²² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya), hlm. 135

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang upaya MI Karangdowo Weleri Kendal dalam era otonomi pendidikan dengan melalui metode wawancara, dalam bidang kurikulum dengan wakamad bidang kurikulum, dalam bidang guru wawancara dengan para guru dan karyawan, dalam bidang dana pendidikan wawancara dengan bendahara Majelis madrasah dan partisipasi masyarakat wawancara dengan anggota Majelis madrasah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang berisikan kejadian, data-data penting yang berkaitan dengan keadaan.²³ Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik itu berupa catatan harian, memori, atau catatan penting lainnya.

Adapun yang dimaksud dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.²⁴ Yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. Metode dokumenter ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah perkembangan, keadaan guru, siswa, karyawan, dan sarana prasarana.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa data yang di kumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisa.²⁵ Analisis data dalam penelitian ini tidak menampilkan angka-angka, melainkan berupa diskripsi dengan menggunakan pola berfikir induktif yakni terjun ke

²³ *Ibid.*, hlm. 161

²⁴ Irawan Sarlito, *Metode penelitian sosial*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), cet. IV, hlm. 71-73

²⁵ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1992), hlm. 140

lapangan, mempelajari proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan- kesimpulan dari proses tersebut.²⁶ Dalam penelitian ini hasil wawancara, pengamatan dan penelaahan dokumen tentang pelaksanaan pendidikan, kondisi dan situasi MI Karangdowo Weleri Kendal baik secara umum maupun khusus semua dituturkan dengan jelas dan detail kemudian diklasifikasikan antara satu dengan yang lainnya.

Jadi analisis data dalam penelitian ini berupa uraian diskriptif mengenai Bagaimana implementasi otonomi pendidikan di madrasah bagi guru PAI di MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri?

²⁶ Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan penilaian pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Alganindo, 2001), hlm. 199

BAB II

OTONOMI DAERAH DAN MADRASAH

A. OTONOMI DAERAH

1. Pengertian Otonomi Daerah

Ada enam istilah yang perlu dijelaskan berkenaan dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, Delegasi, Devolusi, Privatisasi, dan Otonomi.¹ Rodenelli membedakan empat yang pertama, Desentralisasi adalah penyerahan otoritas pusat kepada daerah-daerah. Dekonsentrasi adalah penyerahan tanggungjawab layanan sektor tertentu pada perwakilan pemerintah pusat di daerah. Delegasi adalah pengalihan tanggungjawab untuk membuat keputusan dan pengaturan pengelolaan layanan publik kepada pemerintah daerah.

Devolusi adalah pemerintah pusat mengalihkan otoritas pembuatan keputusan dan implementasinya kepada daerah. Dua konsep lain yaitu, privatisasi merupakan pengalihan otoritas sektoral kepada usaha-usaha swasta. Otonomi merupakan arah balik dari desentralisasi. Desentralisasi berangkat dari otoritas pusat yang di serahkan ke daerah, sedangkan Otonomi berangkat dari pengakuan atas pusat. Bentuk desentralisasi yang terlemah adalah dekonsentrasi.

Dekonsentrasi tidak lebih sekedar memindahkan tanggungjawab manajemen dari pusat kepada propinsi atau tingkat yang lebih rendah sedemikian rupa sehingga pusat tetap mempunyai kontrol penuh. Delegasi adalah bentuk yang lebih ekstensif dimana lembaga pusat meminjamkan wewenang pemerintahan di tingkat yang lebih rendah, atau bahkan pada organisasi otonom, dengan pengertian bahwa wewenang yang didelegasikan dapat ditarik kembali. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang paling besar pengaruhnya karena menyerahkan seluruh wewenang

¹ Dennis A. Rodenelli, *Financing the Desentralization of Education Service an Fasilitis*, dalam Michael Puma dan Dennis Rodinelli, ed., *Desentralizing the Governance of Education*, Wasington D.C., 1995, dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Kerjasama DEPDIKNAS-BAPENNAS Adicita karya Nusa, Yogyakarta, 2001, hlm. 75-76

keuangan, administrasi, dan urusan pendidikan. Penyerahan ini bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan secara tiba-tiba oleh pejabat dipusat begitu saja.²

Sebagaimana di katakan di muka bahwa otonomi merupakan arah balik dari desentralisasi, dimana desentralisasi adalah berangkat dari otoritas pusat yang di berikan kepada daerah, maka otonomi adalah berangkat dari pengakuan pusat atas hak wewenang dan kewajiban yang telah di berikan pada pemerintah daerah. Sedangkan tingkatan-tingkatan hak wewenang dan kewajiban yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah meliputi dekosentrasi, privatisasi, delegasi, dan yang terakhir devolusi. Sedang yang di maksud otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Latar Belakang Otonomi Daerah

Pembangunan nasional kita sejak orde baru di tandai oleh suatu pelaksanaan pembangunan yang sentralistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk pemerintahan sebagai Negara Kesatuan bukan negara Federasi. Lebih-lebih pada tahap permulaan pembangunan nasional, kita menghadapi berbagai gejala setabilitas nasional. Dengan alasan kita tidak bisa membangun apabila kita dilanda oleh berbagai kerusuhan dan ketidakstabilan.

Oleh sebab itu, dasar pembangunan yang kita kenal dalam trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional telah merupakan jaminan berhasilnya pembangunan nasional kita selama ini. Namun ada kritik bahwa pembangunan nasional kita masih terlalu menekankan pada stabilitas nasional, akibatnya ialah kita cenderung merencanakan dan melakukan

² J. Drost S.J., *Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus*, (Jakarta : Gramedia, 1999, hlm. 20-21

sesuatu dari atas dan masih kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam pembangunan itu sendiri.³

Dengan alasan di atas, maka kita harus mewujudkan suatu keseimbangan antara perencanaan dari atas dan partisipasi masyarakat dari bawah, yang semua ini bergantung pada tingkat pendidikan rakyat kita. Namun dalam abad 21 ini terjadi perubahan-perubahan global yang antara lain menuntut partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat agar supaya ikut serta secara aktif sejak tahap awal pembangunan masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan suatu masyarakat dimana para anggotanya menyadari akan tanggungjawab perorangan maupun sosial, atau masyarakat yang mengetahui hak-haknya tetapi juga akan hak-hak sosial atau kebersamaan dari anggota masyarakat itu. Tentunya hal ini menuntut apa yang disebut desentralisasi pembangunan nasional yang sejalan dengan terwujudnya otonomi daerah.

Tuntutan di atas, sesuai dengan bentuk sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut undang-undang 1945 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global, di pandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perpektif Abad 21*, (Magelang : Indonesia Tera, 1999), hlm. 393

Sehubungan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.⁴ Karena kedua undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Untuk melengkapi UU No. 22 tahun 1999 pemerintah juga mengeluarkan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang disusul dengan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Penerapan UU No. 22 tahun 1999 tersebut secara drastis telah merubah konsep penyelenggaraan negara dari sentralistik ke desentralistik.

Dengan UU No. 22 tahun 1999 ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai termaktub dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999 yang menyatakan: “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”⁵ Pasal 7 UU No. 22 tahun 1999 diatas menunjukkan telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam sistem politik Indonesia, kecuali kelima bidang yang secara jelas di sebutkan.

Seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bidang garapan pemerintah daerah tingkat I dan II, pasal 7 tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan semua bidang pendidikan baik pendidikan umum maupun Islam yang termasuk di dalamnya madrasah akan menjadi garapan dan wewenang daerah kabupaten atau kota. Sesuai dengan pasal 7 UU No. 22 tahun 1999, bahwa daerah mempunyai wewenang dalam semua bidang pemerintahan yang ada pada daerahnya

⁴ Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, (Surabaya : Arkola, 1999), hlm.2

⁵ *Ibid.*, hlm.6

kecuali ke lima bidang yang telah jelas di maksud, pengelolaannya diserahkan pada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pendidikan.

Hal ini berarti bahwa daerah mempunyai wewenang yang penuh didalam pendidikan yang ada di daerahnya baik pendidikan umum maupun Islam, yang rambu-rambu pengelolaannya telah dijabarkan dalam PP No. 25 tahun 2000, yang tertuang dalam pasal 2 ayat 11 tentang wewenang pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan pasal 3 ayat 10 tentang wewenang pemerintah propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.⁶

Dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000, diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam system pendidikan nasional (baik yang dilakukan oleh sekolah maupun madrasah) yang ada selama ini. Sebagaimana di deskripsikan oleh banyak ahli pendidikan seperti H.AR Tilaar, sistem pendidikan nasional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut :

- a. Sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik, hal ini mencakup uniformitas dalam segala bidang, termasuk cara berpakaian (seragam sekolah), kurikulum, materi ujian, sistem evaluasi dan sebagainya. Pendek kata sentralisasi telah dipraktekkan dalam segala bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nasional sedetail- detailnya. Pada aspek kurikulum, misalnya hampir tidak ada ruang sama sekali bagi sekolah sebagai garda terdepan penyelenggara pendidikan untuk menambah, apalagi mendesain kurikulum yang diajarkan di sekolahnya.
- b. Sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Lebih parah lagi, masyarakat hanya dianggap sebagai obyek pendidikan yang di perlakukan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk ikut menentukan jenis dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan

⁶ *Peraturan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah No.25 tahun 2000*, (Bandung : Citra Umbara, 2001), hlm.9-10 dan hlm. 24-25

kebutuhannya sendiri. Masyarakat tidak pernah di berlakukan atau di posisikan sebagai subyek dalam pendidikan. Itulah sebabnya, model pemberdayaan (empowering) masyarakat tidak pernah diperkenalkan. Masyarakat hanyalah obyek yang harus menerima paket dan instruksi dari penguasa, ini sama artinya dengan perlakuan atau anggapan bahwa masyarakat adalah kumpulan orang-orang bodoh yang harus di tuntun, di dekte oleh perintah.

- c. Kedua sistem tersebut di atas (sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat) di tunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Birokrasi model seperti itu menjadi bahan subur tumbuhnya budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan melemahnya atau bahkan hilangnya budaya prestasi dan profesionalisme. Birokrasi tidak di bangun atas dasar profesi dan analitis, namun atas dasar *kongkalikong* dengan kekuasaan, koncoisme dan suap.⁷

Dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional, bukan berarti hanya melakukan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang berarti hanya kekuasaan pendidikan yang berpindah dari pusat ke daerah kabupaten atau kota. Jika hanya diartikan sesederhana itu maka tidak mustahil akan tetap terjadi kelemahan sistem pendidikan seperti diatas, tidak sentralistik namun tetap keadaan seperti diatas akan selalu menyelimuti sistem pendidikan nasional kita, adapun yang berubah hanyalah para pelakunya.

Persoalan mendasar dalam desentralisasi pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan dan dengan cara bagaimana dan mengapa demikian. Melalui pengelolaan pendidikan yang desentralistik diharapkan pendidikan dapat berjalan dengan baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan desentralisasi

⁷ Tilaar, menyebutkan tiga ciri pendidikan nasional selama ini yaitu : a) sistem yang kaku dan sentralistik; b) praktek kolusi korupsi dan nepotisme dan c) sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, H. A. R Tilaar, *op. cit.*, hlm. 17-19

tersebut tidak dikehendaki terjadinya kemunduran dalam pendidikan dan tidak juga melemahkan semangat integrasi nasional.

B. MADRASAH

1. Pengertian Madrasah

Madrasah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam.⁸ Sedang madrasah sendiri berasal dari kata “Darasa” artinya belajar sehingga madrasah berarti tempat untuk belajar.⁹ Secara harfiah madrasah berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah” yang notabene juga bukan kata asli dari bahasa kita “sekolah” di alihkan dari bahasa asing misalnya *school* ataupun *scola*.¹⁰

Madrasah di Indonesia merupakan istilah lazim yang hanya dipakai di sekolah-sekolah agama saja dan lebih khusus bagi sekolah Islam, berbeda di negara arab istilah madrasah di pakai pada sekolah pada umumnya.¹¹ Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa diakui telah mengalami perubahan-perubahan walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam.¹² Madrasah dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga sekolah yang berciri khas Islam yang mempunyai penjenjangan dan kurikulum yang jelas.

2. Madrasah dan Pendidikan Nasional

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda lembaga pendidikan Islam telah mulai di anak tirikan dengan cara memilih lembaga pendidikan

⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 611

⁹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Jambatan, 1992), hlm.584

¹⁰ A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung Mizan, 1999), hlm. 18

¹¹ Soegarda Poerbakawatja dan A.H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta : Gunung agung, 1982), hlm. 999

¹² A. Malik Fajar, *op. cit.*, hlm. 19

sekolah umum dari pada lembaga pendidikan Islam, sementara lembaga pendidikan Islam tetap berkembang atas dasar dukungan dan kekuatan masyarakat sendiri. Dengan demikian sejak saat itu sudah dimulai kerangka dikotomik dalam sistem pendidikan untuk rakyat Indonesia antara pendidikan pemerintah Hindia Belanda dan pendidikan Islam. Meskipun demikian dalam perkembangannya banyak sekolah Islam yang mendapat pengakuan dan subsidi dari pemerintah, karena menggunakan sistem dan kurikulum yang hampir sama dengan sekolah - sekolah pemerintah.¹³

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia mengembangkan lembaga pendidikan sekolah sebagai bentuk dari sistem pendidikan Nasional, secara pragmatis hal ini dilakukan karena untuk memudahkan pengelolaan pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian pergumpulan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Islam terus berlangsung, sebagai bagian dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang lebih utuh, pergumpulan itu dilakukan secara tidak bertahap yang menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang cukup signifikan dengan adanya kecenderungan untuk mensistensiskan dua kutub pendidikan nasional dan pendidikan Islam tampaknya semakin terbukti dengan lahirnya keputusan bersama tiga menteri dan undang-undang No.2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional sebagai dasar yuridisnya, kedudukan lembaga pendidikan Islam (madrasah) di perkokoh.¹⁴

Oleh karenanya sejak diberlakukannya UUSPN tersebut, lembaga-lembaga pendidikan Islam juga mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang sama seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan lainnya,

¹³ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta : Logos, 2001), hlm.

¹⁴ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan : Islam dan Umum*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), hlm. 231

maka lembaga pendidikan Islam merupakan bagian integral atau subsistem dari sistem pendidikan Nasional.¹⁵

Kedudukan pendidikan Islam (madrasah) semakin kuat dengan lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 yang merupakan amandemen dari UUSPN 1989. Dalam pasal 1 ayat 3 UUSPN nomor 20 tahun 2003 tersebut dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional.¹⁶ Dengan adanya UUSPN 2003 tersebut di harapkan dapat menepis perbedaan antara pendidikan sekolah umum dan madrasah. Karena madrasah merupakan subsistem dari pendidikan nasional yang lahir dari kebutuhan masyarakat.

3. Posisi Madrasah dalam era otonomi Daerah

Lembaga pendidikan Islam (madrasah) merupakan bagian integral atau subsistem dari sistem pendidikan nasional, sehingga ada indikator bahwa seluruh jenjang dan jenis madrasah pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah oleh karena itu penerapan otonomisasi atau desentralisasi dalam bidang pendidikan tidak terelakan lagi juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap pendidikan Islam (madrasah).¹⁷ Permasalahannya jika sekolah (SD,SLTP,dan SMU) di lingkungan Depdiknas mengalami desentralisasi secara murni kepada pemerintah daerah, bagaimana nasib lembaga pendidikan Islam (MI, MTS dan MA) yang berada dibawah Departemen Agama apakah mengalami proses desentralisasi yang sama kepada pemerintah daerah dan bagaimana skema otonomisasinya.

Harus diakui bahwa proses desentralisasi pendidikan nasional belum banyak melibatkan lembaga-lembaga pendidikan madrasah, namun

¹⁵ M. Atho' Mudhar, *Kebijakan Dasar Pendidikan Politik Pada Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Era Orde Baru*, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti ed., *Pendidikan Islam Demokrasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 9

¹⁶ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

¹⁷ Azumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional : Rekontruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta : Kompas, 2002), hlm.3

lembaga pendidikan tersebut harus mampu berperan aktif mengantisipasi perubahan ini.¹⁸ Untuk mengatasi perubahan-perubahan yang kelihatannya sulit dielakan itu, forum kajian pendidikan Departemen Agama telah merumuskan beberapa alternatif yang dapat dipilih bagi pendidikan agama dan keagamaan *alternatif pertama*; eksistensi insprastruktur Dirjen Bimbaga Depag, tetap dipertahankan, sedangkan penyelenggaraan pendidikan di limpahkan pada Pemda tingkat II.

Dasar pertimbangan alternatif ini adalah bahwa Depag tetap memegang kewenangan dalam mengelola pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan aspirasi masyarakat muslim, selain itu pembinaan pendidikan agama dan keagamaan secara operasional akan sama dengan pembinaan pendidikan di sekolah umum yang akan ditangani oleh Pemda sesuai dengan undang-undang No: 22 tahun 1999.

Dalam alternatif pertama ini, Ditjen bimbaga memiliki kewenangan menetapkan kebijakan nasional, pembinaan dan standarisasi mutu (Kompetensi dasar), monitoring dan evaluasi, sedangkan daerah bertanggung jawab dalam penyediaan sarana prasarana, pengadaan pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidikan. Alternatif ini, jelas memiliki kekuatan yang berkaitan dengan pemeliharaan wewenang bahkan eksistensi Departemen agama itu sendiri sejak dari tingkat pusat sampai daerah.

Dari sudut daerah, pemda memiliki ruang otonomi untuk mendesentralisasikan sumber dana dan daya secara efektif dan efesien keseluruhan jenis dan jenjang pendidikan di wilayah setempat, selain itu pemda dapat menghilangkan deskriminasi terhadap madrasah. Kelemahan alternatif ini kurang selarasnya dengan semangat otonomi dan desentralisasi bahkan ada keinginan dari sebagian kalangan agar

¹⁸ AR. Fadhal Bafadal, *Pendidikan Agama dan Keagamaan di Bawah Satu Atap Sistem Pendidikan Islam*, makalah disampaikan pada diskusi panel "Pendidikan Keagamaan Dibawah Satu Atap Sistem Pendidikan Nasional." Diselenggarakan pusat pengembangan sumber daya manusia (PPSDM) IAIN Starif Hidayatullah, Jakarta, 28 Maret 2000, dalam bukunya Azumardi Azra, *Ibid.*, hlm. 10-11

Departemen agama hanya mengelola pada hubungan antar umat beragama tidak lagi mencakup bidang pendidikan.

Kelemahan lain tidak ada jaminan bahwa setiap Pemda memiliki apresiasi dan memberikan perhatian memadai kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Alternatif kedua*; Institusi Ditjen Bimbaga Depag diintegrasikan kedalam Depdiknas dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan diserahkan pada Pemda sesuai undang-undang No: 22 tahun 1999, Dasar pertimbangan alternatif ini adalah bahwa dengan satu atap dibawah Depdiknas maka penyelenggaraan (termasuk pendanaan) dan kualitas pendidikan agama dan keagamaan akan sama dan sejajar dengan sekolah umum.

Kekuatan alternatif ini adalah dengan satu atap maka pendidikan agama dan keagamaan menjadi lebih terintegrasi kedalam sistem pendidikan nasional, tidak ada lagi dikotomi kelembagaan dan substansial antara pendidikan agama dan keagamaan dengan pendidikan umum juga diskriminasi yang selama ini ada terhadap pendidikan agama dan keagamaan agaknya dapat di minimalisasi, jika tidak dihilangkan sama sekali.

Kelemahan alternatif ini adalah tidak adanya atau kurang adanya jaminan tentang kelangsungan eksistensi pendidikan agama dan keagamaan Islam, karena bukan tidak mungkin mengintegrasikan struktural itu merupakan langkah awal dari peleburan pendidikan agama dan keagamaan Islam kedalam sistem pendidikan umum. Dan juga tidak ada jaminan bahwa para petinggi Depdiknas akan selalu mempunyai kepedulian pada pendidikan dan keagamaan Islam.

Sementara belum jelasnya apakah pendidikan Islam (madrasah) tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan Depag atau dibawah koordinasi dan wewenang pemerintah daerah pilihan mana yang akan diambil Departemen agama jelas akan mengandung konsekuensi dan dampak masing-masing. Tetap terlepas dari pilihan mana yang akan diambil, semangat dan proses otonomi dan desentralisasi suka atau tidak

suka turut mempengaruhi keseluruhan sistem pendidikan Islam termasuk madrasah.

C. MADRASAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

1. Kondisi Madrasah

a) Kurikulum madrasah

Kurikulum adalah program pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa dibawah tanggungjawab sekolah untuk membantu pertumbuhan/perkembangan pribadi dan kompetensi sosial anak didik.¹⁹

Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi perencana pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Dipandang penting, karena kurikulum dapat memberikan arahan dan patokan keahlian kepada peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pengajaran. Dalam hal ini Claudia Fuhriman Eliason dan Jenkins menyatakan “*The curriculum should provides opportunities for development in other areas besides intellectual or cognitive growth.*”²⁰ Pernyataan ini mengandung maksud bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan di dalam pengembangan wilayah intelektual maupun pertumbuhan ranah kognitif peserta didik. Dengan demikian, kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan.

Terkait dengan tujuan kurikulum tersebut David Pratt mengemukakan *six main criterias may be applied to curriculum aim.*

¹⁹ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sekolah*, (Bandung : Algesindo, 1996), hlm. 5-6

²⁰ Claudia Fuhriman Eliason and Loa Thomphson Jenkins, *A Prictical Guide To Early Childhood Curriculum*, (USA: Mosby Compony, 1981), hlm. 52.

*Aim should: (1) specify an intention; (2) identify a significant intended charge in the learner; (3) be concise; (4) be exact; (5) be complete;(6) be acceptable.*²¹

Menurut pendapat David Pratt di atas bahwa ada 6 (enam) kriteria yang harus dipenuhi dalam menetapkan tujuan kurikulum, antara lain:

1. Mempunyai tujuan yang jelas
2. Mengidentifikasi terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh pengajar
3. Ringkas dan jelas
4. Tepat sasaran
5. Menyeluruh
6. Dapat diterima

Dengan dasar di atas dapat mengetahui sifat dan kedudukan tujuan kurikulum di sekolah.

Kurikulum sebagai program pendidikan mencakup sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan, pengalaman belajar atau kegiatan belajar, program belajar untuk siswa dan hasil belajar yang diharapkan/ditaati Kurikulum madrasah sebagai pendidikan Islam harus memiliki dua komponen pokok yakni komponen pendidikan umum dan Islam. Karena status madrasah pada semua jenjang disamakan dengan sekolah umum, maka madrasah telah sepenuhnya mengikuti kurikulum yang ditetapkan Depdiknas (terakhir kurikulum KTSP).

Dengan penerapan kurikulum KTSP maka isi pendidikan madrasah tidak memiliki perbedaan yang selalu substansial dan substansif dengan sekolah umum. Padahal dipihak lain madrasah sesuai dengan akar eksistensi dan pengalaman historis harus memiliki ciri dan karakter pendidikan Islam. Pembinaan dan pengembangan

²¹ David Pratt, *Curriculum Design And Develoment*, (USA: Harcourt Brace Javanovich Pblisher, 1980), hlm. 147.

karakter ciri Islam tersebut sejauh ini cukup bisa diwujudkan melalui kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP dalam mengalokasikan waktu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan.

Adapun hal-hal yang bisa dijadikan pegangan sebagai prinsip dalam pengembangan kurikulum, seperti yang telah diungkapkan oleh Peter F. Oliva salah satunya adalah :

“As a point of departure, it has already been postulated that change is both inevitable and necessary, for it is through change that live forms grow and develop.”²²

Dari pemaparan Peter F.Oliva di atas menerangkan bahwa, perkembangan kurikulum dapat dikatakan sebagai titik awal dari perubahan yang tidak dapat dielakkan dan hal itu dibutuhkan, karena dengan perubahan suatu bentuk kehidupan itu akan tumbuh dan berkembang.

Karena itu madrasah perlu mengembangkan kurikulum pendidikan Islamnya, baik melalui celah “muatan lokal” maupun dengan penambahan waktu belajar yang dikhususkan untuk materi-materi keislaman. Dilihat dari pengelolaan dan pengembangan kurikulum dibedakan antara sistem pengelolaan terpusat (sentralisasi) dan tersebar (desentralisasi). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1985, 1975 dan 1984 bersifat sentralisasi artinya hanya ada satu kurikulum untuk satu jenis pendidikan di seluruh Indonesia. Sedangkan dalam kurikulum 1994 telah ada muatan yang disisipkan pada berbagai bidang studi yang sesuai, dan hal ini lebih diintensifkan lagi pelaksanaannya pada kurikulum KTSP.

Dalam kurikulum KTSP muatan lokal tidak lagi disisipkan dalam bidang studi tapi menggunakan pendidikan monolitik berupa bidang studi baik bidang studi wajib maupun pilihan. Namun dengan adanya kebijaksanaan otonomi daerah, kemungkinan muatan lokalnya

²² Peter F. Oliva, *Developing The Curriculum*, (Boston: Little Brown and Company, 1982), hlm. 30

lebih besar lebih beragam dan sistemnya tidak terpusat lagi. Dan dengan kebijaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan daerah dan sekolah dapat menambahkan kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah (madrasah) serta masyarakat sekitarnya.

b) Tenaga pengajar (guru)

Guru adalah orang yang dilimpahi tanggungjawab, dari orang tua yang karena keterbatasannya, namun bukan berarti mengurangi tanggungjawab orang tua dalam mendidik putra putrinya. Adapun firman Allah yang mendukung profesi guru adalah surat An Nisa' ayat 58 sebagai berikut :



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. an-Nisa' : 58)

Dari surat diatas jelas tersirat bahwa kita di suruh menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya artinya kewajiban bagi kita untuk memberikan pendidikan kepada orang yang membutuhkan pendidikan. Dengan kata lain bahwa seorang guru itu harus menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik (siswa) dengan cara yang mudah dipahami dan di mengerti oleh mereka. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Al Ghozali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* yang mengatakan bahwa

seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran harus sesuai dengan taraf kemampuan berfikir siswa sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa.²³

Dari pendapat tersebut tersirat bahwa syarat seorang guru selain mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi juga harus mempunyai metode atau cara mengajar yang baik. Dengan tersebut diatas maka dibutuhkan seorang guru yang berkualitas, sehingga masalah yang dihadapi guru seperti di bawah setandar (*underqualified*) dan berbeda pemahaman (*missmacth*) yang secara umum dihadapi madrasah,²⁴ merupakan masalah penting karena guru turut menentukan mutu pendidikan sedangkan mutu pendidikan akan menentukan mutu generasi muda sebagai calon warga negara dan masyarakat dan masalah mutu guru sangat bergantung pada system pendidikan guru.²⁵

Guru merupakan salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran yang sangat strategis dan banyak mengambil peran dalam proses pendidikan secara luas. Khususnya dalam pendidikan persekolahan. Oleh karena itu, kita memang banyak menaruh harapan kepada guru didalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jika harapan tersebut sulit untuk dipenuhi maka setidaknya guru yang menangani langsung masalah pendidikan adalah guru-guru yang memiliki kualitas cukup dan memadai.

c) Keuangan pendidikan

Dana pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk penyediaan sarana prasarana seperti tanah, laboratorium, perpustakaan, media

²³ Al Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, jilid I, terj. Ismail Yakup (CV. Faiza, 1969), hlm. 140-142

²⁴ Menurut data dari EMIS guru madrasah yang mempunyai kompetensi yang memadai dari tingkat pendidikannya hanya sekitar 20% sedangkan selebihnya adalah kurang memenuhi setandar kompetensi (*under qualified*) dalam Masyarakat Pendidikan, Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) dengan BEP Depag RI, Jakarta, Vol. 1 No. 3 2001, hlm. 9

²⁵ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru : Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 19

belajar, operasi pengajaran, pelayanan administrasi dan sebagainya. Dana pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang, tetapi segala pengorbanan yang diberikan untuk aktifitas dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itulah yang diraih utama. Dalam kaitannya dengan dana pendidikan, Thomas mengungkapkan adanya dana langsung dan tidak langsung, serta dana masyarakat dan dana pribadi.

Dana langsung adalah dana yang langsung digunakan untuk operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan proses belajar mengajar yang terdiri atas dana pembangunan dan dana rutin. Dana tidak langsung adalah dana berupa keuntungan yang hilang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dana masyarakat adalah dana yang dikeluarkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berupa uang sekolah, uang buku dan dana lainnya. Sedangkan dana pribadi adalah dana langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku dan dana hidup bagi siswa.²⁶

Sumber dana dalam pendidikan madrasah adalah pemerintah dan masyarakat. Madrasah negeri dibiayai melalui anggaran pemerintah, dan di tambah uang sekolah siswa yang berasal dari sumbangan BP3. Sedangkan sumber utama pembiayaan pendidikan madrasah swasta adalah uang sekolah siswa, dana Yayasan, sedikit hibah dari pemerintah provinsi dan kabupaten, amal keagamaan (zakat, wakaf, hibah, dst).²⁷

d) Peran serta masyarakat

Kondisi peranserta masyarakat terhadap madrasah negeri yang ada sekarang ini. Hanya terbatas ketika sekolah tidak mampu memberi imbalan yang memadai maka dilakukan pendekatan kepada orang tua

²⁶ J. Alam Thomas, *The Productive School a System Analisis Approach to Education Administration* Chicago, University, 1985, dalam bukunya E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 168-171

²⁷ Ghulam Farid Malik, *Pedoman Manajemen Madrasah*, Basic Education Project (BEP), (Yogyakarta : Depag RI dengan Forum Kajian Ilmu dan Budaya, 2000), hlm. 2

untuk cari tambahan dana dengan berbagai cara bagi kebutuhan pendanaan pendidikan yang tidak dicukupi oleh pemerintah.²⁸ Rendahnya peran serta masyarakat terhadap pendidikan di madrasah merupakan masalah yang pokok yang di hadapi madrasah khususnya dalam menghadapi otonomi, dimana pemerintah pusat tidak lagi bertanggungjawab terhadap pendidikan seperti sebelumnya maka siapa yang akan bertanggung jawab kalau bukan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap madrasah.

2. Strategi Pelaksanaan Otonomi dalam Pendidikan

Salah satu bentuk desentralisasi pendidikan adalah terwujudnya manajemen berbasis sekolah (School Based Management) yang ditandai dengan adanya otonomi luas ditingkat sekolah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan sekolah. MBS merupakan bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan, karena MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemerataan dan efisiensi serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah.²⁹

Model ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat dan dipihak lain semakin meningkatkan otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi. Istilah Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “ School based management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang

²⁸ Anggani Sudono, *Mengembangkan Kesadaran Masyarakat (Berpartisipasi Meningkatkan Pendidikan Anak Bangsa)*, dalam Inservice Training BP3 untuk MI dan MTs Membangun Masyarakat Pendidikan, Basic Education Proyek (BEP) Depag RI dengan Indonesian Institute For society Empowerment (INSEP), Jakarta, 2000, hlm. 23

²⁹ Fasli Jalal, *op. cit.*, hlm. 160

memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan dalam hal itu kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Pada sistem MBS sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah.³⁰ Adapun strategi pelaksanaan MBS kaitannya dengan otonomi dalam pendidikan dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap sosialisasi prinsip-prinsip MBS melalui media masa atau forum lainnya baik melalui pelatihan atau seminar.
- 2) Tahap aplikasi dari tahap sosialisasi baik yang melalui seminar atau dari pelatihan yang di tandai dengan mulai di bentuknya dewan madrasah yang beranggotakan tokoh masyarakat, orang tua murid, para guru dan karyawan.
- 3) Tahap pengelolaan dari tahap aplikasi dengan usaha mewujudkan partisipasi masyarakat yang tinggi melalui dewan sekolah dan otonomi pengelolaan pendidikan yang luas bagi bagi sekolah.

3. Strategi Madrasah Dalam Era Otonomi Daerah

a) Bidang kurikulum

Dengan adanya kebijaksanaan otonomi daerah, kemungkinan materi muatan lokalnya lebih besar lebih beragam dan sistemnya tidak terpusat lagi. Dengan kebijakan itu di harapkan daerah dan sekolah dapat menambahkan kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah (madrasah) serta mayarakat disekitarnya. Sehingga

³⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah..... op. cit.*, hlm. 24

dengan adanya hal itu memungkinkan terjadi perbedaan muatan kurikulum antara daerah satu dengan daerah lainnya atau bahkan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya dalam satu daerah. Sebagaimana rancangan struktur kurikulum berbasis kompetensi Depdiknas 2002 bahwa daerah atau sekolah (madrasah) dapat menambah mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

b) Bidang tenaga pengajar

Guru merupakan salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran yang sangat strategis dan banyak mengambil peran dalam proses pendidikan secara luas. Khususnya dalam pendidikan persekolahan. Oleh karena itu, kita memang banyak menaruh harapan kepada guru didalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jika harapan tersebut sulit untuk dipenuhi maka setidaknya guru yang menangani langsung masalah pendidikan adalah guru-guru yang memiliki kualitas cukup dan memadai.

Sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu diadakan pemberdayaan guru secara sistematis dengan melibatkan aspek-aspek antara lain: kesejahteraan, rekrutmen dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karir, dan perlindungan profesi.³¹

Isu pokok dalam rendahnya motivasi dan kinerja guru adalah tentang rendahnya kesejahteraan gaji guru sehingga dalam hal ini harus ada upaya bagaimana cara meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru yang menjadi perhatian pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Selain itu pemerintah juga harus menjamin pengembangan karier guru dan perlindungan atas profesinya.

Selain persoalan kesejahteraan guru, yaitu masalah penempatan dan rekrutmen guru dalam hal ini sekolah (madrasah) dan daerah harus diberikan kesempatan untuk mengangkat guru sendiri yang sesuai

³¹ Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium ke III*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 12

dengan kebutuhan sekolah (madrasah). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah profesionalisme guru itu sendiri. Sehingga masalah mismatch atau underqualified khususnya yang banyak terjadi pada guru madrasah harus mendapatkan perhatian yang serius pula.

Hal itu dapat dijumpai dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keguruan atau penyetaraan pendidikan yang sesuai. Kedua masalah tersebut harus segera diselesaikan khususnya dalam menghadapi kurikulum berbasis kompetensi yang didalamnya sangat dibutuhkan dengan kreatifitas dan profesionalitas guru.

c) Bidang Keuangan Pendidikan

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa pembiayaan pendidikan madrasah negeri dibiayai melalui anggaran pemerintah, dan ditambah uang sekolah siswa yang berasal dari sumbangan BP3. Namun dengan adanya kebijakan otonomi, pemerintah tidak lagi yang menyelenggarakan pendidikan tetapi membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan melalui skema subsidi sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Skema subsidi yang berkeadilan adalah satu paket subsidi dengan formula anggaran dan satuan biaya yang tidak terpisah-pisah berupa formulasi guru, anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan bantuan operasional (BOP), yang berlaku bagi sekolah negeri dan swasta, umum maupun keagamaan, di kota dan di desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.³² Skema subsidi disini artinya bahwa sekolah akan mendapatkan dana sesuai dengan tinggi rendahnya kemampuan sekolah, masyarakat serta daerah dalam bidang pendanaan. Keuangan dan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

³² Ibrahim Musa, *Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah*, dalam Inservice training BP3 untuk MI dan MTs membangun masyarakat pendidikan, Depag RI, 2002, hlm.32

Hal tersebut menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan dan masyarakat. Infestasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien dan diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur keuangan, pengalokasian dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran.

d) Bidang Peranserta masyarakat

Pengaruh madrasah terhadap sekolah sebagai lembaga sosial, terasa amat kuat dan berpengaruh pula kepada individu-individu yang ada dalam lingkungan sekolah. Hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, yaitu dengan melibatkan orang tua dan masyarakat serta isu-isu yang timbul dan bagaimana menyelesaikan isu-isu tersebut. Menurut Wahyu Sumidjo dalam buku *kepemimpinan kepala sekolah*, tujuan pokok pengembangan hubungan efektif dengan masyarakat setempat adalah untuk memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti didalam kegiatan sekolah.³³ Sebagaimana diungkapkan dimuka bahwa orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap pendidikan anak-anaknya dan karena keterbatasannya menyerahkan tanggung jawab orang tua tersebut. Adapun dalil yang menyatakan kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah firman Allah dalam surat Thoha ayat 132 yang berbunyi:



³³ Wahyu Sumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah : Tinjauan teoritik dan permasalahannya*, (Jakarta : Grasindo, 2001), hlm. 334



“Dan perintahkanlah kepada keluargamu, mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak menerima rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (Qs. Toha:20:132)³⁴

Selain firman Allah tersebut di atas juga terdapat sebuah hadits nabi yang menyatakan kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya yang artinya :

“Didiklah anak-anakmu dan jadikanlah pendidikan mereka itu baik” (HR Ibnu Majah)³⁵

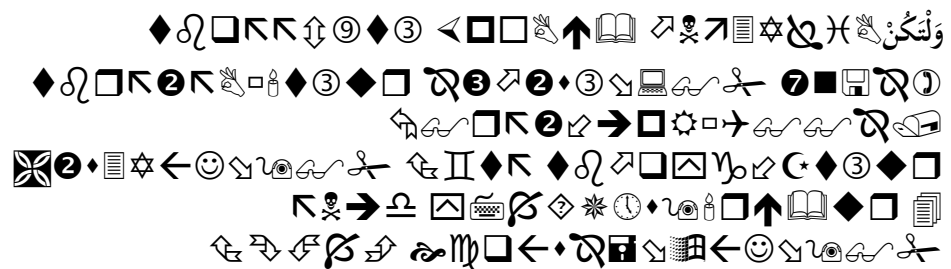
Adapun bentuk keterlibatan orang tua dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah dapat berupa keterlibatan dalam kegiatan madrasah, dalam kegiatan instruksional madrasah dalam aktifitas belajar dirumah, dalam menjalin hubungan komunikasi antara sekolah dan rumah, dan dalam mengelola madrasah.³⁶

Masyarakat adalah siapapun baik perorangan maupun kelompok, baik yang berdomisili disekitar madrasah maupun tidak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang relevan dan kongruen dengan program madrasah. Berbeda dengan sekolah umum, masyarakat madrasah adalah meliputi pemerintah daerah, kelompok orang tua murid, yayasan, dewan madrasah, pesantren, assosiasi profesi, LSM, masyarakat umum. dan lembaga sosial dan lain-lain yang selanjutnya di sebut dengan lingkungan eksternal madrasah. Adapun firman Allah yang mendukung peran serta masyarakat dalam pendidikan adalah surat Al Imran ayat 104 yang berbunyi:

³⁴ Sunarjo, dkk., *op. cit.*, hlm. 492

³⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut : Darul fikr, tt), hlm. 1211

³⁶ Daryono, *Manajemen Partisipasi Masyarakat : Pengembangan Madrasah dan Keterlibatan Masyarakat*, dalam Inservice training KKM MTs MI, Depag RI, Jakarta, 2001, hlm. 125-126



“Dan hendaklah ada diantara kamu satu golongan yang mengajak manusia, kepada kebaikan menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang mungkar, mereka itulah yang memperoleh kebahagiaan” (QS. Al Imron:104)³⁷

Firman Allah tersebut diatas menyuruh kepada kita semua untuk menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang yang mungkar dengan kata lain ikut berpartisipasi dalam pendidikan berarti kita telah melaksanakan firman Allah tersebut.

Otonomi daerah memang melegakan bagi suatu otonomi dan demokratisasi pendidikan. Tapi dengan otonomi kita juga sedang mempertaruhkan nasib pendidikan kita, jika warga masyarakat masih bersikap dan berparadigma seperti dulu, maksudnya cuci tangan dalam tanggung jawab pendidikan maka nasib pendidikan kita akan lebih parah, sebab ketika pemerintah pusat tidak lagi bertanggung jawab atas sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab kalau bukan masyarakat setempatnya? Kalau masyarakat menolak dari tanggungjawab ini, sama saja kita melakukan “bunuh diri” dengan otonomi dan demokrasi pendidikan.³⁸

³⁷ Sunarjo, dkk., *op. cit.*, hlm.93

³⁸ Sindunata, *Menggagas Pradigma Baru Pendidikan : Demokratisasi, Otonomi, Civil Sosity dan Globalisasi*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), hlm. 13

BAB III
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAKHUL ULUM KARANGDOWO
WELERI
DALAM ERA OTONOMI DAERAH

A. SITUASI UMUM MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAKHUL ULUM KARANGDOWO WELERI

1. Sejarah dan Perkembangan MI Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri

Lulusan sekolah taman kanak-kanak (TK) tidak semuanya dapat diampung di sekolah-sekolah dasar favorit di lingkungan kecamatan Weleri yang dikarenakan terbatasnya tempat. Sedangkan Pemerintah RI telah mencanangkan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat SD/MI dan SMP/Mts, yang berarti memberi kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk tetap dapat menyekolahkan anaknya. Oleh karena itu diperlukan lembaga formal yang dapat menampung lulusan TK di kecamatan Weleri khususnya sekitar desa Karangdowo.

Dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Karangdowo Weleri sangat membantu warga sekitar yang menginginkan anaknya sekolah di lembaga sekolah agama. Hal ini sesuai dengan kurikulum madrasah yang memuat materi keagamaan jauh lebih banyak daripada sekolah dasar lain. Gedung yang di tempati Madrasah ini milik sendiri, walaupun proses penggunaannya bersama-sama dengan MDA, namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar.

2. Organisasi Madrasah

Pengorganisasian pada prinsipnya adalah proses pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat di gerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Pengorganisasian merupakan langkah menuju pelaksanaan rencana yang di tentukan sebelumnya. Susunan, bentuk serta besar kecilnya organisasi harus disesuaikan dengan tujuan yang telah di tetapkan.

Adapun sistem organisasi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri sebagai berikut :

a. Kepala Madrasah

Kepala Madrasah mempunyai tanggung jawab memimpin pelaksanaan administrasi madrasah dan seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran di madrasah.

b. Wakamad Bidang Kurikulum

Bertugas membantu tugas kepala madrasah yang berkenaan dengan bidang akademik, seperti pembuatan jadwal pelajaran, jadwal piket, kalender madrasah dan sebagainya.

c. Wakamad Bidang Kesiswaan

Bertugas dan bertanggungjawab dalam bidang;

- membina pramuka
- membina kesenian
- membina UKS
- menyelenggarakan dan mengkoordinasikan peringatan hari-hari besar Islam /Nasional bersama Wakamad koordinator urusan humas
- mengatur kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan setiap seminggu sekali
- mengikuti perkemahan dalam rangka menyongsong PERSAMI
- mengikuti setiap kegiatan siswa, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten
- bertindak atas kepala madrasah apabila kepala madrasah berhalangan
- hadir atau sedang dinas keluar kota

d. wakamad Urusan Humas

Bertugas dan bertanggungjawab di bidang;

- mengusahakan kesejahteraan guru dan karyawan
- mengadakan konsultasi atau silaturahmi/ home visit dengan wali kelas

- mengadakan konsultasi dengan pengurus
- menyusun rencana pembangunan fisik
- mengadakan konsultasi dengan tokoh masyarakat
- bersama-sama wakamad kesiswaan menyelenggarakan PHBN/PHBI
- bersama-sama Komite menyelenggarakan rapat awal tahun dan akhir tahun
- pertanggungjawaban KOMITE dan membuat RAPBM tahun ajaran baru
- memberikan informasi kepada wali murid dan masyarakat
- menyelenggarakan bakti sosial
- memberikan informasi kepada wali murid dan masyarakat
- membuat pertanggungjawaban kepada kepala madrasah
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala madrasah
- bertindak atas nama kepala madrasah apabila kepala madrasah berhalangan
- hadir atau sedang dinas luar kota

e. wakamad Urusan Sarana Prasarana

Bertugas dan bertanggungjawab dalam bidang:

- Pengadaan, penambahan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan sarana prasana fisik madrasah meliputi seluruh bangunan /gedung yang ada di Madrasah
- Pengadaan, penambahan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan seluruh sarana prasarana dan alat pendidikan serta barang-barang inventaris lainnya
- Pembangunan dan pelaksanaan program penyediaan sumber belajar dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosial
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala madrasah

f. Wali Kelas

Guru yang menjadi wali kelas disamping tugas diatas di tambah dengan:

- Membina kelasnya
- Mengisi nilai pada buku raport dan buku pengkoordinasian leger, dan membagikan raport
- Mengadakan bimbingan dan penyuluhan di kelasnya
- Membuat rekapitulasi absensi kelas setiap bulannya
- Mengkoordinasikan kegiatan siswa yang ada di kelasnya

g. Siswa

Bertugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar baik program intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan kesiswaan, melaksanakan tata tertib madrasah, dan melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru dan kepala sekolah.¹

Adapun bagan struktur organisasinya untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam halaman *lampiran*.

3. Keadaan Guru, Siswa dan Karyawan

a. Keadaan Guru dan Karyawan

Tenaga guru yang ada di Madrasah ibtdaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri tahun pelajaran 2007/2008 sebanyak 7 orang terdiri dari 3 guru pria dan 4 guru wanita mayoritas guru disini GTT hanya 1 orang guru yang berstatus pegawai negeri. Sedangkan jumlah karyawan di Madrasah ibtdaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri adalah 1 orang yaitu penjaga madrasah. Adapun untuk lebih jelasnya statistik guru dan karyawan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini

**TABEL III
KEADAAN GURU
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

NO	NAMA	IJAZAH	JABATAN	MENGAJAR	KET.
1	Muchid	D II Setia WS	PLH	B I, B Arab	GTT
2	Siti Rokhmatun	D II STAIN	Wali kelas VI	IPA,	PNS

¹ Dokumen MI Karangdowo

		Salatiga		Matematika	
3	Indarti SPd.I	S I	Wali kelas V	Aqidah, SKI	GTT
4	Saekhoni A.Ma	D II	Wali kelas IV	Fiqih, BTA	GTT
5	Iin Nur Z A.Ma	D II	Wali kelas I	Ke-NU-an	GTT
6	Zulaekha	SMA	Wali kelas II	PAI kelas II	GTT
7	Mukti A. S.Pd.I	S I	Wali kelas III	PAI kelas III	GTT
8	Kemisih	SMP	Penjaga	-	-

b. Keadaan Siswa

Siswa Madrasah Ibtidaiyah karangdowo tahun pelajaran 2007/2008 seluruhnya sebanyak 126 siswa yang terdiri dari 66 siswa putra dan 60 siswa putri. Dan dibagi dalam enam kelas. Kelas I terdiri dari 23 , kelas II terdiri dari 25 siswa, kelas III terdiri dari 15 siswa, kelas IV terdiri 22 siswa, kelas V terdiri dari 20 siswa dan kelas VI terdiri dari 21 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat penulis sajikan keadaan siswa MI karangdowo weleri dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL IV
KEADAAN SISWA MI Miftakhul Ulum karangdowo
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

NO	KELAS	PUTRA	PUTRI	JUMLAH
1	I	13	10	23
2	II	10	15	25
3	III	10	5	15
4	IV	15	7	22
5	V	6	14	20
6	VI	12	9	21
	Jumlah	66	60	126

4. Keadaan Saran Prasarana

Sarana dan prasarana milik Madrasah ibtidaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri yang di gunakan sebagai penunjang dalam kegiatan belajar mengajar secara umum dalam penelitian ini di kelompokkan kedalam empat bagian meliputi sarana lokal yang ada di madrasah, jumlah buku perpustakaan, jumlah alat pendidikan dan perlengkapan sekolah untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam TABEL V di halaman lampiran.

B. MADARASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM KARANGDOWO WELERI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

1. Visi, Misi dan Tujuan MI Miftakhul Ulum karangdowo

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di MI Miftakhul Ulum karangdowo mengacu pada :

- a. Visi : Menciptakan insan yang berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia
- b. Missi :
 1. Menyelenggarakan pendidikan Islam sehingga siswa mampu mengamalkan syari'at Islam dan berakhlak mulia sebagai perwujudan bakti kepada Allah, bangsa dan negara.
 2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas siswa.
 3. Membangun sinergi antar lembaga pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran.
 4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan
- c. Tujuan : menyediakan wadah yang memadai kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan bagi putra putrinya agar menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia dalam rangka menyukseskan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

2. Upaya MI Miftahul Ulum Dalam Bidang Kurikulum

- a. Kurikulum

Dengan adanya undang-undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) 2003 sebagai dasar yuridisnya maka kedudukan madrasah semakin kokoh. Namun sebagai konsekuensinya madrasah termasuk didalamnya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri, harus mempunyai dua komponen pokok yaitu komponen pendidikan umum dan Islam, karena status madrasah pada semua jenjang telah di samakan dengan sekolah umum dan di tambah lagi dengan kurikulum lokal karena madrasah telah sepenuhnya mengikuti kurikulum yang telah di tetapkan Depdiknas (terakhir kurikulum KTSP).

Dengan adanya ketentuan tersebut maka beban materi pelajaran dari kurikulum yang harus diselesaikan siswa madrasah itu lebih banyak dibanding dengan sekolah-sekolah umum. Sehingga wajar apabila siswa madrasah mempunyai spesifikasi kurang dalam mata pelajaran umum dibanding dengan sekolah-sekolah umum, demikian pula sebaliknya siswa dari sekolah umum kurang mempunyai spesifikasi dalam mata pelajaran agama di banding dengan siswa dari madrasah.²

Sebagaimana ketentuan diatas maka Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri memiliki dua komponen pokok yakni komponen pendidikan umum dan Islam dan di tambah dengan muatan lokal, sehingga jumlah seluruh mata pelajarannya adalah 16 mata pelajaran dan alokasi waktunya dalam perminggu adalah 45 jam pelajaran dan untuk setiap jam pelajaran sekitar 45 menit.³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL VI
STRUKTUR KURIKULUM MI Miftakhul Ulum karangdowo
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

² Hasil wawancara dengan Mukhid, A.Ma pada observasi pendahuluan pada tanggal 2 Mei 2008

³ Hasil wawancara dengan Siti Rokhmatun A.Ma Waka kurikulum pada tanggal 5 Januari 2008

Alokasi waktu

N O	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI
1	Fiqih	2	2	2	2	2	2
2	Akidah Akhlaq	2	2	2	2	2	2
3	SKI	0	0	2	2	2	2
4	Qur'an Hadits	2	2	2	2	2	2
5	B Arab	0	0	0	2	2	2
6	PKN	2	2	2	2	2	2
7	B Indonesia	4	4	4	5	5	5
8	Matematika	4	4	4	5	5	5
9	IPA	3	3	3	4	4	4
10	IPS	3	3	3	3	3	3
11	B Inggris	0	0	0	2	2	2
12	Kertanges	3	3	3	4	4	4
13	Penjaskes	4	4	4	4	4	4
14	BTA	2	2	2	2	2	2
15	B Daerah	2	2	2	2	2	2
16	Ke NU an	2	2	2	2	2	2
	Jumlah	41	41	41	45	45	45

Dari tabel tersebut diatas jelas bahwa Madrasah Ibtidaiyah karangdowo terdapat 16 mata pelajaran umum, yaitu PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Kertanges, dan Penjaskes, dan 5 mata pelajaran agama Islam yaitu Fiqih, Akidah akhlaq, Sejarah kebudayaan Islam, Qur'an hadits, dan Bahasa arab, selain itu terdapat juga 2 mata pelajaran lokal yaitu Bahasa daerah, dan Baca tulis alqur'an.

Mata pelajaran Bahasa daerah (Bahasa Jawa) di kembangkan atau diajarkan di Madrasah ibtidaiyah miftakhul ulum karangdowo

weleri, Karena Madrasah ini berlokasi di daerah Jawa, yang secara langsung sangat membutuhkan akan bahasa dan tata cara Kebudayaan daerah Jawa dalam melakukan interaksi antar masyarakat di sekitarnya dan juga untuk melestarikan bahasa dan kebudayaan tersebut.

Sedangkan mata pelajaran Baca tulis al qur'an dikembangkan atau diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri, diharapkan dapat membantu para siswa yang masih kesulitan dalam baca tulis Al qur'an.⁴

Pihak madrasah langsung melakukan penyaringan melalui tes yang sangat sederhana baik mata pelajaran umum seperti Matematika, IPS dan Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran agama Islam sendiri meliputi SKI dan baca tulis Alqur'an. Dari tes baca tulis Alqur'an inilah diketahui bahwa peserta tes atau calon siswa madrasah banyak sekali yang belum bisa membaca dan menulis ayat Alqur'an dengan baik dan benar, Sehingga dengan alasan ini pihak madrasah mengembangkan kurikulum baca tulis Alqur'an atau yang lebih tepatnya memasukkannya kedalam mata pelajaran khusus mulai tahun pelajaran 2007/2008 ini. Sedangkan materi baca tulis Alqur'an meliputi tajwid sebagai cara untuk dapat membaca Alqur'an, dan cara menulis ayat alqur'an yang benar. Selain dari pelajaran baca tulis Alqur'an, khusus kelas VI akhir juga diadakan tes akhir khusus tentang pengetahuan agama Islam meliputi praktek sholat, hafalan surat-surat pendek dan do'a, yang dilakukan secara perorangan dan bergantian dengan di dampingi oleh seorang guru. Selain tes pengetahuan agama juga diadakan pameran khusus hasil karya dan kreatifitas siswa kelas VI sebagai upaya untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Mengenai banyaknya mata pelajaran yang harus di selesaikan siswa dan jumlah jam pelajaran yang besar dalam tiap minggunya pihak madrasah belum mempunyai rencana untuk mengurangi maupun

⁴ Wawancara dengan Saekhoni A.Ma Waka kesiswaan tanggal 5 Mei 2008

menambah baik mata pelajaran maupun jam pelajaran kecuali kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Namun pihak madrasah tidak akan menolak memasukkan mata pelajaran tertentu yang dibutuhkan bagi siswanya, misal madrasah ingin memasukkan bimbingan penyuluhan (BP/BK) yang di tangani oleh wali kelas sehingga hal ini bisa menambah jam pelajaran atau mengurangi jumlah jam pelajaran tertentu yang waktunya di anggap lebih dan perlu di kurangi jumlah jam pelajarannya.⁵

b. Guru

Menyadari akan pentingnya memberantas kemiskinan dan kebodohan dan usaha menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, maka Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri ikut mengambil bagian dalam usaha mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan melalui usaha untuk selalu meningkatkan mutu pendidikannya. Usaha ini dapat di lihat dengan banyaknya siswa masuk madrasah ini dalam tiap tahunnya dan kualitas lulusannya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang di tandai dengan semakin meningkatnya hasil nilai ujian akhir para siswanya dengan rasio kelulusan seratus persen.

Dalam setiap tahun ajaran minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke Madrasah ibtidaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri semakin meningkat hal ini dapat dilihat dalam besarnya siswa yang ada di madrasah dalam tiap tahunnya semakin bertambah jumlah siswanya.⁶

Dalam usaha meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikannya, banyak hal yang telah dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftahul

⁵ Wawancara dengan Saekhoni A.Ma pada tanggal 5 Mei 2008 beliau mengatakan bahwa belum ada rencana pengembangan kurikulum kedepan secara pasti untuk mengurangi maupun menambah jam pelajaran atau menambah mata pelajaran.

⁶ Wawancara dengan Ibu Indarti, S.Pd.I pada tanggal 5 Mei 2008 beliau mengatakan jumlah siswa yang masuk ke MI tahun ajaran 2007/2008, di sesuaikan dengan jumlah gedung yang ada di madrasah.

Ulum Karangdowo Weleri diantaranya dengan memilih guru yang berkualitas untuk mengajar mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan bidang studi dan keahliannya,

Dengan memilih guru yang berkualitas yang sesuai dengan bidang studinya di harapkan materi dari mata pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat di pahami dan dimengerti oleh siswa dengan mudah. Usaha Madrasah ibtidaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri dalam memilih guru yang berkualitas dapat dilihat dalam tabel tentang keadaan guru secara umum di muka.

Dimana di dalam tabel itu terlihat jelas bahwa semua guru yang mengajar bidang studi tertentu sudah sesuai dengan bidang studinya, kecuali hanya dijumpai pada guru PAI yang mengajar atau memegang mata pelajaran tertentu yang tidak sesuai dengan bidang studinya. Seperti guru PAI mengajar Bahasa Arab atau kertangkes.

Missmachth yang terjadi di Madrasah ibtidaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri seperti hal diatas di karenakan mayoritas guru yang berusia muda, sehingga berakibat pada pembentukan opini bahwa guru madrasah kurang pengalaman. Untuk mengatasi permasalahan di atas tentu butuh jembatan antara pihak madrasah dan masyarakat yaitu Komite sekolah.⁷

Selain peningkatan mutu melalui jenjang pendidikan juga dianjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan keguruan yang sesuai dengan bidang studinya selain dari KKG (kelompok kerja guru) yang diadakan setiap bulan sekali yang bertujuan untuk menambah pengetahuan guru bidang administrasi atau dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga tidak ada guru yang under qualified dalam bidang pengajarannya.

Mengenai gaji guru di Madrasah ibtidaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri untuk setiap bulannya di sesuaikan dengan

⁷ Observasi pada tanggal 4 sampai 5 Mei 2008

kemampuan pihak madrasah dan kondisi umum yang ada di sekolah atau madrasah lain pada umumnya.⁸

c. Dana pendidikan

Untuk melancarkan proses pelaksanaan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di butuhkan suatu dana pendidikan yang memadai bagi pelaksanaan pendidikan, selain masalah dana pendidikan juga perlu di tunjang dengan pengelolaan dana pendidikan secara efektif dan efisien. Sehingga dengan tidak adanya dua hal tersebut proses kegiatan belajar mengajar tidak akan mencapai tujuan maksimal yang di harapkan. Dana pendidikan di Madrasah ibtdaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri bersumber dari dua macam yaitu dana dari masyarakat dan dana dari

Adapun dana dari masyarakat sendiri hanya berasal dari dana sukarela. Yang dimaksud dana sukarela adalah dana yang di berikan oleh masyarakat secara sukarela atau tidak mengikat yang disertai pernyataan kesanggupan masing-masing wali murid yang besarnya tidak ditentukan. Sebagaimana halnya sekolah yang berada dibawah naungan LP Ma'arif, Madrasah ibtdaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri menggantungkan dana pendidikannya lebih banyak dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengelolaan dana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum karangdowo, secara umum dana pendidikan madrasah di gunakan secara efisien dan efektif untuk seluruh keperluan yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan belajar mengajar yang ada di madrasah. Alokasi dana pendidikan di Madrasah ibtdaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri secara umum dapat di kelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu :

⁸ Wawancara dengan Zulaekha pada tanggal 12 Mei 2008, beliau mengatakan bahwa setiap guru GTT mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan madrasah untuk setiap bulannya.

1. Belanja anggaran pendidikan meliputi belanja anggaran kegiatan belajar mengajar, kegiatan semesteran, kegiatan ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya
2. belanja sarana prasarana pendidikan meliputi belanja alat kantor, alat/bahan pengajaran, pemeliharaan gedung dan barang inventaris, buku perpustakaan dan sejenisnya
3. belanja rutin meliputi pemeliharaan halaman dan kebun, perjalanan dinas, rapat-rapat dinas, penataran, listrik dan sejenisnya
4. belanja personalia honorium meliputi gaji guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap, kesejahteraan kepala madrasah dan yang sejenisnya.⁹

Pengalokasian dana pendidikan madrasah dalam setiap bulannya di pertanggungjawabkan oleh bendahara Majelis Madrasah kepada kepala madrasah atas persetujuan ketua majlis dan para anggota, dan untuk tiap tahunnya dana pendidikan madrasah di pertanggungjawabkan kepada Majelis Madrasah dan seluruh orang tua murid.

d. Partisipasi masyarakat

Dengan bertambah besarnya jumlah siswa dalam setiap tahun pelajaran yang masuk ke Madrasah ibtidaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri merupakan salah satu wujud bertambah besarnya partisipasi dari masyarakat terhadap madrasah.

Dana pendidikan dalam setiap bulannya di pertanggungjawabkan kepada kepala madrasah dan untuk setiap tahunnya di pertanggungjawabkan kepada majlis madrasah secara umum kepada madrasah baik berupa dana BOS maupun dana sukarela. Sebagaimana dalam pembangunan gedung dan ruang kelas baru pada saat sekarang

⁹ Wawancara dengan Iin Nur Zakiya A. Ma 10 Mei 2008 beliau mengatakan bahwa dana pendidikan di lembaga ini dialokasikan dalam empat kelompok yaitu untuk belanja anggaran penyelenggaraan pendidikan, belanja sarana prasarana pendidikan, belanja rutin dan gaji personalia dan honorium.

ini masyarakat juga ambil bagian dalam bantuan dana selain dana pendidikan dari pemerintah yang diambil dari APBN melalui Depag.

Wujud partisipasi masyarakat agar berjalan dengan lancar di perlukan suatu wadah organisasi dan manajemen pengeloan yang baik pula. Partisipasi masyarakat di Madrasah ibtdaiyah miftakhul ulum karangdowo weleri melalui organisasi KOMITE (badan pembantu penyelenggaraan pendidikan).

Komite disini sering kali disebut Majelis Madrasah yang ada di Madrasah Ibtidaiyah miftakhul ulum diketuai oleh seorang tokoh masyarakat setempat yang beranggotakan para dewan guru madrasah, orang tua murid dan tokoh masyarakat sekitar. Adapun susunan pengurusnya dapat dilihat dalam stuktur di bawah ini:

Struktur organisasi Majelis Madrasah MI Miftakhul Ulum

Ketua I : KH. Suyuti

Ketua II : Slamet riyadi

Sekertaris I : Ach. Juari, S.Pd

Sekertaris II : Saekhoni A.Ma

Bendahara I : Abdullah

Bendahara II : Iin Nur Zakiya A.Ma

Anggota : Muji Riyanto, Ahmad Rodhi dan ukti Ansori¹⁰

Pengurus dan anggota Majelis Madrasah mengadakan rapat tiga bulan sekali secara rutin dan bisa mengadakan rapat kurang dari tiga bulan atau kapan saja yang di sesuaikan dengan keperluan. Dalam pertemuan tiga bulanan yang di lakukan oleh Pengurus dana anggota Majelis Madrasah hal yang di bahas dalam rapat adalah perkembangan madrasah, rencana pembangunan dan segala hal yang berhubungan dengan situasi dan kondisi Madrasah ibtdaiyah miftakhul ulum

¹⁰ Dokumen MI Karangdowo Weleri Tahun ajaran 2002/2003

karangdowo weleri kedepan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar.¹¹

TABEL V
KEADAAN SARANA PRASANA MI Karangdowo Weleri
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

NO	NAMA	Jumlah	Keterangan
1	Lokal	10	
2	Ruang belajar	6	
3	Laboratorium	1	
4	Perpustakaan	1	
5	Ruang kepala	1	
6	Ruang guru	1	

¹¹ Wawancara dengan Iin Nur Zakiya A.Ma (Bendahara Majelis Madrasah) beliau mengatakan bahwa Majelis Madrasah mengadakan pertemuan tiga bulan sekali dan bisa melakukan pertemuan lebih dari itu tergantung dengan kebutuhan

BAB IV
ANALISIS TERHADAP UPAYA
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAKHUL ULUM KARANGDOWO
WELERI
DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Pada bab IV ini berisikan analisis tentang upaya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Semarang dalam menghadapi otonomi daerah yang meliputi upayanya dalam bidang kurikulum, guru, dana pendidikan dan partisipasi masyarakat. Sebagaimana diketahui kebijaksanaan otonomi daerah yang tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, pada hakikatnya kebijaksanaan tersebut memberikan otonomi yang luas termasuk didalamnya bidang pendidikan baik sekolah umum atau lembaga pendidikan Islam (madrasah) pada pemerintah daerah khususnya kabupaten dan kota dalam upaya memberdayakan daerah.

1. Upaya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri Dalam bidang Kurikulum

Sebagaimana di kemukakan pada bab sebelumnya bahwa Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri sesuai dengan SKB tiga Menteri dan UUSPN tahun 1989 maka madrasah mengajarkan pendidikan umum sebagai pendidikan pokok selain dari pendidikan agama (Islam). Sehingga lulusan dari Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri ini mempunyai kesempatan yang sama dengan Sekolah Dasar untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri saat ini menggunakan kurikulum KTSP. Sehingga di dalamnya memuat pendidikan umum, agama (Islam), dan muatan lokal. Muatan pendidikan umum di madrasah ini antara lain PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPA, IPS, IPS, IPS,

Bahasa Inggris, Kertangkes, dan Penjaskes sedangkan 5 mata pelajaran agama Islam yaitu Fiqih, Akidah Akhlaq, SKI, Qur'an Hadits dan Bahasa Arab, dan 2 muatan lokal yaitu Bahasa daerah dan baca tulis Alqur'an. Sedangkan alokasi jam pelajaran untuk setiap minggunya yaitu 46 jam pelajaran dan untuk setiap jam pelajarannya 45 menit sebagaimana di jelaskan pada bab sebelumnya. Sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan agama bagi para siswanya maka Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri mengembangkan kurikulum baca tulis al qur'an. Pengembangan mata pelajaran lokal ini merupakan upaya maju bagi madrasah dalam mengembangkan mata pelajaran lokal yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar. Karena telah diketahui dalam bab sebelumnya bahwa siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri ini lebih banyak yang berasal dari Taman Kanak-kanak umum dari pada yang dari Rodhotul Atfal dengan prosentase 60% untuk yang dari TK dan 40% atau sisanya yang dari RA. Sehingga siswa yang ada di madrasah ini pengetahuan agamanya kurang. Pengembangan materi baca tulis al qur'an tersebut sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah, dimana sekolah dapat mengembangkan kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sekolah.¹ Dalam usaha meningkatkan kualitas keberagamaan siswa upaya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri tidak hanya berhenti pada mata pelajaran baca tulis Al qur'an saja. Madrasah juga mengembangkan system evaluasi keagamaan khusus kelas VI yang berisikan tentang seluruh mata pelajaran agama yang pernah di peroleh di madrasah. Sistem evaluasi yang di kembangkan dalam hal ini meliputi praktek Sholat lengkap dengan bacaannya, hafalan surat-surat pendek dan bacaan do'a yang harus di ikuti oleh setiap siswa kelas enam secara bergantian dengan di bimbing oleh seorang guru PAI. Selain bentuk evaluasi keagamaan dalam usaha meningkatkan kreatifitas, bakat dan minat siswa khusus kelas VI maka madrasah mengadakan

¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik dan Emplementasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 80

pameran hasil karya dari kelas VI untuk setiap akhir tahun. Pengembangan bakat dan minat siswa melalui pameran ataupun system evaluasi tersebut diatas secara tidak langsung dapat mendukung pembentukan kecakapan hidup siswa dalam pergaulannya dengan masyarakat.² Dari semua usaha yang telah di lakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri diatas merupakan wujud dari usaha madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas siswa baik dari mata pelajaran umum maupun mata pelajaran agama.

2. Upaya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri dalam Bidang Tenaga Pengajar

Guru merupakan salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak pula mengambil proses yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, kita menaruh harapan yang sangat besar kepada guru di dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Maka yang perlu di lakukan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan yaitu perlu diadakan pemberdayaan guru secara sistematis dengan melibatkan aspek-aspek antara lain: kesejahteraan, rekrutmen dan pengangkatan, pembinaan dan pengembangan karier dan perlindungan profesi.³

Dalam usaha meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikannya, usaha yang dilakukan madrasah di antaranya adalah dengan memilih atau mengangkat guru yang sesuai bidang studinya untuk mengajar mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan bidang studi dan profesionalitasnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga missmacth dan kesalahan dalam menerangkan. Jadi dengan memilih guru yang profesional diharapkan materi yang diterangkan oleh guru dapat mudah dipahami dan cepat di mengerti oleh siswa.

² Tim Broad Based Education Depdiknas, *Kecakapan Hidup (Life Skil: Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas)*, SIC Bekerja sama dengan: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unesa dan Swa Bina Qualita Indonesia Jatim, 2002, hlm. 16

³ Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidika di Indonesia Memasuki Melenium ke III*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 12

Guru missmacth (salah kamar) yang mengajar materi tidak sesuai dengan bidang studinya hampir tidak di jumpai di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri. Karena guru telah mengajar sesuai dengan bidang studinya. Missmacth hanya di jumpai pada beberapa guru PAI yang mengajar Bahasa Arab dan Kertangkes. Missmacth di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri ini disebabkan karena banyak guru PAI yang masih bersetatus GTT yang telah mengabdikan di Madrasah lebih dari 4 sampai 5 tahun. Dengan kondisi guru GTT diatas pihak madrasah tidak memungkinkan untuk mengurangi jumlah guru PAI tersebut. Memahami akan pentingnya meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan di butuhkan seorang guru yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

Maka dalam hal ini, Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri telah ambil bagian mulai dari memilih dan mengangkat guru (GTT) baru. Hal lain yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas gurunya adalah dengan menganjurkan para guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai bidang studinya baik yang diadakan oleh Depag ataupun Diknas, dan melanjutkan pendidikannya bagi guru yang tingkat pendidikannya belum memenuhi syarat untuk mengajar di tingkat SD/MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas guru juga diadakan musyawarah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk setiap bulannya yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas guru dalam menerangkan mata pelajaran.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru banyak hal yang telah dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri, di mana telah di kemukakan pada bab sebelumnya bahwa gaji guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri khusus guru tidak tetap (GTT) mendapatkan gaji disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan Madrasah dan kondisi besarnya gaji yang ada pada sekolah atau madrasah pada umumnya. Selain gaji pokok tersebut seorang guru GTT juga mendapatkan gaji berupa subsidi dari pemerintah untuk setiap bulannya berupa tunjangan fungsional guru

dan Insentif dari APBD. Sebagaimana diatas Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri telah melakukan upaya terhadap peningkatan kualitas para gurunya mulai dari pengangkatan guru baru (GTT) sampai kesejahteraan guru.

Namun hal itu belum maksimal karena masih banyak hal yang belum bisa di lakukan oleh pihak madrasah misalnya madrasah belum dapat mengembangkan karier guru tidak tetapnya yang telah lama mengabdikan untuk menjadi guru tetap di madrasah yang hal itu dikarenakan belum ada kesempatan bagi sekolah atau madrasah untuk mengangkat dan merekrut gurunya sendiri.

3. upaya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Dalam Bidang Keuangan

Sebagaimana di kemukakan dalam bab sebelumnya untuk melancarkan proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di butuhkan suatu dana pendidikan yang memadai bagi pelaksanaan pendidikan, selain masalah dana pendidikan juga perlu di tunjang dengan pengelolaan dana pendidikan secara efektif dan efisien. Sehingga dengan tidak adanya dua hal tersebut proses kegiatan mengajar tidak akan mencapai tujuan maksimal yang di harapkan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Hal tersebut menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.⁴ Sebagaimana dalam sistem sentralisasi dalam era otonomi pemerintah juga ikut bertanggungjawab terhadap pendidikan. Bedanya pemerintah tidak seharusnya yang menyelenggarakan

⁴ E.. Mulyasa, *Manajemen Barbasis Sekolah : Konsep, Karakteristik dan Emplementasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 172

pendidikan tetapi membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan melalui sekema subsidi sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri dalam hal dana pendidikan sampai saat ini bersumber dari pemerintah yang diambil dari RAPBN melalui Depag dan dari masyarakat baik dari dana Infaq yang bersifat sukarela. Pengelolaan dana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri, secara umum dana pendidikan di madrasah di gunakan secara efisien dan efektif untuk seluruh keperluan yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan belajar mengajar yang ada di madrasah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa alokasi dana pendidikan di madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri dialokasikan dalam empat kelompok untuk belanja anggaran pendidikan, belanja sarana prasana pendidikan, belanja rutin dan belanja personalia honorium.

Dalam mengelola dan mengatur pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri untuk setiap bulannya di pertanggungjawabkan kepada kepala madrasah oleh bendahara majlis madrasah dengan persetujuan pengurus majlis dan untuk setiap tahunnya di pertanggungjawabkan kepada anggota majlis madrasah secara umum.

4. Upaya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Otonomi memang melegakan bagi suatu otonomi dan demokratisasi pendidikan. Tetapi dengan otonomi kita juga sedang mempertaruhkan nasib pendidikan kita. Jika warga masyarakat masih bersikap dan berparadigma seperti dulu, maksudnya cuci tangan dalam tanggungjawab pendidikan maka nasib pendidikan kita lebih parah. Sebab ketika pemerintah pusat tidak lagi bertanggungjawab atas sekolah. Siapa yang akan bertanggungjawab kalau bukan masyarakat setempatnya?. Kalau masyarakat menolak dari tanggungjawab ini,

sama saja kita melakukan “bunuh diri” dengan otonomi dan demokratisasi pendidikan.⁵

Dengan adanya otonomi daerah di mana pemerintah pusat tidak lagi bertanggungjawab terhadap pendidikan maka masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pendidikan yang ada di lingkungannya. Artinya masyarakat harus dilibatkan dalam setiap keputusan yang akan diambil yang berhubungan dengan kemajuan pendidikan di sekolah (madrasah). Wujud partisipasi masyarakat yang lain bisa berupa material baik dana pendidikan ataupun pikiran. Partisipasi masyarakat orang tua murid dan tokoh masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri terorganisir dalam Majelis madrasah yang di ketuai oleh seorang tokoh masyarakat dan beranggotakan oleh para dewan guru, karyawan madrasah, orang tua murid dan para tokoh masyarakat setempat.

Dalam wujud partisipasi masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri, karena masih barunya pembentukan majlis itu sendiri yaitu pada tanggal awal Maret 2008 maka partisipasi masyarakat di madrasah masih rendah artinya partisipasi masyarakat di madrasah masih terbatas pada hal-hal yang bersifat materiel seperti dana pendidikan dan seandainya ada bentuk partisipasi yang lain namun bentuknya masih terbatas. Rendahnya partisipasi masyarakat oleh orang tua dan tokoh masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya masih barunya madrasah ini di lingkungan setempat..

Dengan kondisi partisipasi masyarakat terhadap madrasah yang masih rendah ini. Maka di perlukan suatu usaha agar masyarakat setempat ikut merasa memiliki terhadap madrasah dengan cara berpartisipasi aktif dalam setiap rencana pembangunan pendidikan kedepan lebih-lebih di era otonomi saat ini di mana pemerintah pusat tidak lagi bertanggungjawab terhadap pendidikan seperti sebelumnya namun hanya memfasilitasi lembaga pendidikan (sekolah/madrasah)

⁵ Sindunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan : Demokratisasi, Otonomi, Civil Siasaty dan Globalisasi*, (Yogyakarta :Kanisius, 2000), hlm. 13

melalui jalur subsidi. Menyadari akan pentingnya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang berkualitas dan bermutu sebenarnya telah banyak hal yang telah dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri.

Diantaranya di mulai dengan membentuk majlis madrasah yang di ketuai oleh tokoh masyarakat dan beranggotakan oleh tokoh masyarakat, orangtua murid, dewan guru dan para karyawan yang karena masih barunya organisasi ini maka belum bisa berfungsi maksimal sebagaimana yang di harapkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menguraikan dan membahas tentang upaya Madrasah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri) akhirnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam bidang kurikulum upaya persiapan yang telah dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri diantaranya hal yang sudah dilakukan adalah mengembangkan muatan lokal Baca tulis Al Qur'an (BTA) yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat walaupun persinya masih kecil untuk suatu pengembangan kurikulum lokal yang mendapat jatah 20% dari kurikulum wajib.
2. Dalam bidang guru upaya persiapan yang telah dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri khususnya dalam menghadapi Kurikulum baru atau yang biasanya disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diantara hal yang telah dilakukan dalam bidang ini adalah mengikuti pelatihan-pelatihan guru tentang kurikulum yang disesuaikan dengan jenis mata pelajaran yang diampu baik yang dilakukan oleh Depag maupun Depdiknas dan mengikuti Musyawarah Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk setiap bulannya.
3. Dalam bidang keuangan upaya persiapan yang telah dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri karena sumber dana pendidikan masih dari pemerintah pusat maka upaya yang telah dilakukan dalam bidang ini adalah adanya efektifitas dan efisiensi serta keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan yang ditandai dengan adanya laporan pemanfaatan dana oleh Bendahara BOS ataupun bendahara Majelis Madrasah kepada Kepala sekolah dan Semua anggota Majelis Madrasah.

4. Dalam bidang partisipasi masyarakat upaya persiapan yang telah dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri karena sebagaimana umumnya partisipasi masyarakatnya rendah maka usaha yang telah diupayakan diantara adalah dengan mengaktifkan kembali Komite Sekolah beserta Majelis Madrasah yang beranggotakan dari guru, karyawan, tokoh masyarakat, dan orang tua murid.

B. SARAN-SARAN

Setelah penulis melaksanakan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan, maka berikut ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri lebih meningkatkan peran Majelis Madrasah dalam pengelolaan pendidikan di Madrasah baik dalam bidang kurikulum lokal, dana pendidikan, sarana prasarana atau dalam bidang yang lain yang ada kaitannya dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan.
2. Dalam bidang kurikulum khususnya dalam bidang kurikulum local hendaknya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri melibatkan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan agama baca tulis al qur'an para peserta didiknya melalui pendidikan informal yang ada di masyarakat.
3. Dalam bidang tenaga guru hendaknya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri lebih mengoptimalkan kualitas dari para gurunya baik melalui pelatihan-pelatihan atau dengan usaha meningkatkan jenjang karir atau kesejahteraan guru.
4. Dalam bidang keuangan hendaknya Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri dalam jangka tertentu di harapkan untuk dapat lebih bias meningkatkan partisipasi masyarakat (dana) khususnya dalam bidang sarana prasarana

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat hidayah dan taufik-Nya akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terlalu sederhana dan jauh dari kesempurnaan, hal ini karena disebabkan keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini. Menyadari akan keterbatasan akhirnya penulis berharap atas kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan kepada-Nyalah penulis memohon semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan kepada para pembaca yang budiman, serta betapapun sederhananya penulisan skripsi ini semoga dapat pula bermanfaat demi kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan kemajuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Karangdowo Weleri khususnya. Dengan kesederhanaan skripsi ini semoga bermanfaat pula bagi para peneliti lain dalam masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995
- Azra, Azumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi & Demokratisasi*, Jakarta: Kompas, 2002
- _____, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung Mizan, 1999
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005, cet. VI
- Daryono, *Manajemen Partisipasi Masyarakat: Pengembangan Madrasah dan Keterlibatan Masyarakat*, dalam Inservice training KKM MTs MI, Depag RI, Jakarta, 2001
- Data dari EMIS guru madrasah yang mempunyai kompetensi yang memadai dari tingkat pendidikannya hanya sekitar 20% sedangkan selebihnya adalah kurang memenuhi setandar kompetensi (under qualified) dalam Masyarakat Pendidikan, Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) dengan BEP Depag RI, Jakarta, Vol. 1 No. 3 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Drost, J. S.J., *Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus*, Jakarta : Gramedia, 1999
- Fadjar, A. Malik, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan penyusunan naskah Indonesia, 1998
- Ghozali, al, *Ihya' Ulumuddin*, jilid I, terj. Ismail Yakup, CV. Faiza, 1969
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid II, Yogyakarta : Andi Ofset, 2000
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Jambatan, 1992
- Ismail SM dan Abdul Mukti ed., *Pendidikan Islam Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Kerjasama DEPDIKNAS-BAPENNAS Adicita karya Nusa, Yogyakarta, 2001
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, juz II, Beirut : Darul fikr, tt
- Malik, Ghulam Farid, *Pedoman Manajemen Madrasah*, Basic Education Project (BEP), Yogyakarta : Depag RI dengan Forum Kajian Ilmu dan Budaya, 2000

- Masyarakat Pendidikan, *Madrasah diambang Otonomi dan Globalisasi*, Vol. I No. 5, Maret-April, 2002
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996, ed. III, cet 7
- Mulyasa, E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi:Konsep, Karakteristik dan Emplementasi*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002
- Musa, Ibrahim, *Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah*, dalam Inservice training BP3 untuk MI dan MTs membangun masyarakat pendidikan, Depag RI, 2002
- Peraturan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah No.25 tahun 2000*, Bandung: Citra Umbara, 2001
- Poerbakawatja, Soegarda dan Harahap, A.H., *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta : Gunung agung, 1982
- Purwanto, Agus Joko, *Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan dalam Inservice Training KKM MTs/ MI*, Depag RI, Jakarta, 2001
- Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta : Logos, 2001
- Sarlito, Irawan, *Metode penelitian sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000, cet. IV
- Sindunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan:Demokratisasi, Otonomi, Civil Siasaty dan Globalisasi*, Yogyakarta :Kanisius, 2000
- Soenarjo dkk, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Alwaah, 2003
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997, cet. II
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sekolah*, Bandung : Algesindo, 1996
- Sudono, Anggani, *Mengembangkan Kesadaran Masyarakat (Berpartisipasi Meningkatkan Pendidikan Anak Bangsa)*, dalam Inservice Training BP3 untuk MI dan MTs Membangun Masyarakat Pendidikan, Basic Education Proyek (BEP) Depag RI dengan Indonesian Institute For society Empowerment (INSEP), Jakarta, 2000
- Sujana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan penilaian pendidikan*, Bandung : Sinar Baru Alganindo, 2001
- Sumidjo, Wahyu, *Kepemimpinan Kepala Sekolah:Tinjauan teoritik dan permasalahannya*, Jakarta : Grasindo, 2001
- Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1992

- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004
- Suyanto dan Hisyam, Djihad, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium ke III*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000
- Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi pendidikan Nasional Dalam Perpektif Abad 21*, Magelang : Indonesia Tera, 1999
- Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan : Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta : Grasindo, 2002
- Tim Broad Based Education Depdiknas, *Kecakapan Hidup (Life Skil: Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas)*, SIC Bekerja sama dengan: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unesa dan Swa Bina Qualita Indonesia Jatim, 2002
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Surabaya : Arkola, 1999
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

Dokumen MI Karangdowo

Dokumen MI Karangdowo Weleri Tahun ajaran 2002/2003

Observasi pada tanggal 4 sampai 5 Mei 2008

Wawancara dengan Iin Nur Zakiya A.Ma (Bendahara Majelis Madrasah)

Wawancara dengan Ibu Indarti, S.Pd.I pada tanggal 5 Mei 2008

Wawancara dengan Iin Nur Zakiya A. Ma 10 Mei 2008

Wawancara dengan Mukhid, A.Ma pada observasi pendahuluan pada tanggal 2 Mei 2008

Wawancara dengan Saekhoni A.Ma pada tanggal 5 Mei 2008

Wawancara dengan Saekhoni A.Ma Waka kesiswaan tanggal 5 Mei 2008

Wawancara dengan Siti Rokhmatun A.Ma Waka kurikulum pada tanggal 5 Januari 2008

Wawancara dengan Zulaekha pada tanggal 12 Mei 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sodikun

Tempat/ tanggal lahir : Kendal, 18 Maret 1980

Alamat asal : Gg.Masjid 02/ VI Pucangrejo Gemuh Kendal

Pendidikan

- SDN Karang Sari 01, lulus tahun 1992
- SMP NU Al- Hidayah Kendal, lulus tahun 1995
- MA.Negeri Kendal, lulus tahun 2000
- Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2002

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tertanda,

Sodikun
NIM. 3102196